



# PT PLN (Persero)

## **Laporan Tengah Tahunan 2021 (Juli-Desember 2021)**

Sustainable Energy Access in Eastern  
Indonesia - Electricity Grid Development  
Program Phase 2

Result Based Lending (RBL) – ADB

27 Januari 2022

## TABLE OF CONTENTS

<b>1.</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>4</b>
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Lingkup Kerja Program	4
1.3	Lingkup Laporan Tengah Tahunan	5
<b>2.</b>	<b>Struktur Pengelolaan dan Pelaksanaan Program</b>	<b>6</b>
2.1	Program Pinjaman Berbasis Hasil ADB	6
2.2	Pengelolaan dan Pelaksanaan Program PLN	8
<b>3.</b>	<b>Status Pelaksanaan Program RBL ADB</b>	<b>9</b>
3.1	Ringkasan Pencapaian DLI pada Periode Pelaporan	9
3.2	Kelayakan Pencairan Kinerja 2020 dan Semester I 2021 (Juta USD)	10
3.3	Indikator Terkait Pencairan (DLIs)	12
3.4	Non-Indikator Terkait Pencairan (Non-DLI)	24
3.5	Implementasi Hibah	27
3.6	Rencana Aksi Program (PAP) Implementasi Program RBL ADB	29

## Singkatan

ADB	=	Asian Development Bank
PLN	=	Perusahaan Listrik Negara (State Electricity Company)
WKB	=	Wilayah Kalimantan Barat (West Kalimantan Region)
WKSKT	=	Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (South and Central Kalimantan Region)
WKTKU	=	Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (East and North Kalimantan Region)
WMMU	=	Wilayah Maluku dan Maluku Utara (Maluku and North Maluku Region)
WP2B	=	Wilayah Papua dan Papua Barat (Papua and West Papua Region)
AP2T	=	Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (Centralized Customer Service Application)
APKT	=	Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (Integrated Complaints Management Application)
ckm	=	Circuit kilometre
COD	=	Commercial Operation Date
DLI	=	Disbursement-Linked Indicator
ERP	=	Enterprise Resource Planning
FPR	=	Financing for Prior Results
GIS	=	Geographic Information System
GWh	=	Gigawatt-hour
IVA	=	Independent Verification Agent
KPI	=	Key Performance Indicator
kV	=	Kilovolt
MVA	=	Megavolt-ampere
PAP	=	Program Action Plan
PID	=	Project Implementation Document (ADB)
PLN	=	Perusahaan Listrik Negara (State-Owned Electricity Company)
PMU	=	Program Management Unit
PPA	=	Power Purchase Agreement

RBL	=	Results Based Lending (ADB)
RUPTL	=	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Electricity Power Supply Business Plan)
SAIDI	=	System Average Interruption Duration Index
SAIFI	=	System Average Interruption Frequency Index
SILM	=	Sistem Informasi Laporan Manajemen (Management Reporting Information System)
KMP	=	Kalimantan, Maluku and Papua
SPKK	=	Satuan Pemantau Kinerja Korporat (PLN internal performance management unit)

## 1. PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 8 Desember 2020, PT PLN (Persero) menandatangani perjanjian pinjaman dengan ADB senilai US\$600 juta (periode 2020-2025). Pinjaman ADB akan mendukung Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur - Program Pengembangan Jaringan Listrik Tahap 2.

Program ini didedikasikan untuk sembilan provinsi di Kalimantan, Maluku, dan Papua (KMP) di Indonesia Timur yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik guna menghubungkan bisnis dan rumah tangga serta meningkatkan kualitas hidup di Indonesia Timur dengan pemanfaatan listrik secara berkelanjutan sebagai penggerak utama peningkatan kegiatan ekonomi. Hal akan berkontribusi pada tujuan keseluruhan dari pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.

Program ini mengikuti struktur Pinjaman Berbasis Hasil (RBL), di mana dana dicairkan secara bertahap dan hanya disalurkan ke PLN ketika Indikator Terkait Pencairan (DLI) yang disepakati bersama terpenuhi (dengan ketentuan untuk pencairan disesuaikan dengan pemenuhan sebagian DLI). DLI berorientasi pada hasil dan bukan berorientasi pada proses, sehingga memungkinkan PLN keleluasaan untuk menggunakan proses dan sistemnya sendiri untuk mengelola dana dan mencapai hasil program.

Selain DLI, PLN telah setuju untuk menerapkan serangkaian tindakan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Program (PAP), yang juga termasuk sebagai perjanjian pinjaman dalam perjanjian pinjaman ADB.

### 1.2 Lingkup Kerja Program

Lingkup kerja ADB dapat dirinci sebagai berikut:

RBL ADB
<p><b>Output 1: Jaringan distribusi tenaga Listrik diperkuat dan diperluas.</b> Program harus dilacak dengan panjang saluran distribusi tegangan menengah yang terpasang (DLI 4).</p>
<p><b>Output 2: Penggunaan energi terbarukan meningkat</b> Listrik yang disediakan untuk masyarakat di daerah yang disasar akan berasal dari campuran sumber daya, termasuk generator diesel kecil yang paling umum digunakan untuk jaringan terpencil. Output 2, didukung oleh hibah ACEF, secara eksplisit berfokus pada peningkatan pembangkit listrik dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (PV), mini dan mikro hidro, dan pembangkit listrik tenaga biogas skala kecil (DLI 5).</p>
<p><b>Output 3: Kapasitas kelembagaan diperkuat dan pemantauan sosial ditingkatkan.</b></p>

## RBL ADB

Output 3 berfokus pada peningkatan pengelolaan aset dan limbah (DLI 6) dan peningkatan aspek sosial dan gender melalui lokakarya PLN tentang penggunaan energi yang aman dan produktif, dengan partisipasi perempuan minimal 30% (DLI 7). Pengadaan elektronik dan sistem pembayaran kontrak akan diintegrasikan dan diluncurkan untuk meningkatkan pelaporan dan pemantauan (DLI 8).

### 1.3 Lingkup Laporan Tengah Tahunan

Laporan Tengah Tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan perkembangan terkini secara berkala kepada ADB mengenai (i) pencapaian hasil program secara keseluruhan; (ii) status protokol verifikasi DLI dan DLI; (iii) status perjanjian dalam perjanjian pinjaman dan hibah; dan (iv) hasil dari program implementasi PAP.

Laporan Tahunan ini mencakup periode pelaporan dari **1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021**.

## 2. STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

### 2.1 Program Pinjaman Berbasis Hasil ADB

Program Pinjaman Berbasis Hasil (RBL) ADB berfokus pada akses energi berkelanjutan di Indonesia Timur – Program Pengembangan Jaringan Listrik.

Ini adalah tonggak penting ADB L4009-INO:

- a. Persetujuan ADB : 24 November 2020
- b. Penandatanganan Pinjaman : 8 Desember 2020
- c. Penandatanganan Jaminan : 16 Desember 2020
- d. Efektivitas Pinjaman : 14 Januari 2021
- e. Periode Implementasi : Januari 2020 – Desember 2025 (5 tahun)
- f. Penyelesaian Program : Dec 31<sup>st</sup>, 2025
- g. Penutupan Pinjaman : Jun 30<sup>th</sup>, 2026

Alokasi dan penarikan dana hasil pinjaman serta rincian alokasi pencairan RBL ADB untuk Kalimantan, Maluku, dan Papua (KMP) sesuai jadwal pencairan tahun 2020-2025 pada *Aide Memoire Loan Inception Mission* Februari 2021 ditunjukkan di bawah ini pada Tabel 1.

**Table 1: Jadwal Pencairan dalam \$ juta (Sumber: ADB)**

Disbursement-Linked Indicator (DLI)	Alokasi Pendanaan Total ADB	Pembagian Loan (%)	Prior Results	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>DLI 1</b>	150	25,0		30	30	30	30	30	-
<b>DLI 2</b>	75	12,5	30	9	9	9	9	9	-
JFPR Grant	3	-	0,6	1,0	1,0	0,4	-	-	-
<b>DLI 3</b>	90	15,0		18	18	18	18	18	-
<b>DLI 4</b>	120	20,0		24	24	24	24	24	-
<b>DLI 5</b>	50	8,3		5	9	9	9	9	9
ACEF Grant	3	-		1,0	1,0	1,0	-	-	-
<b>DLI 6</b>	65	10,8		11	11	11	11	11	10
<b>DLI 7</b>	30	5,0		6	6	6	6	6	-
<b>DLI 8</b>	20	3,3	4	-	4	4	4	4	-
<b>TOTAL (Loan only)</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>103</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>19</b>
<b>TOTAL (Grant)</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nilai target pemantauan untuk masing-masing indikator hasil selama periode pinjaman (2020 sd 2025) ditunjukkan pada Tabel 2. Indikator-indikator tersebut akan dipantau melalui Program Action Plan (PAP).

**Table 2: ADB RBL Disbursement Allocations (Source: ADB)**

No	Ukuran	Definisi Indikator	Satuan	Alokasi Pencairan (\$ juta)
<b>Outcome</b>				
1	Meningkatkan jumlah total pelanggan PLN KMP	Target minimum peningkatan pelanggan adalah 6,77	Juta Pelanggan	150
2	Meningkatkan jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan listrik PLN	Target minimal peningkatan pelanggan 112.428 termasuk 10% rumah tangga yang dikepalai perempuan	KK Miskin	75
<i>JFPR Grant</i>		<i>All poor households</i>		3
3	Gangguan permanen saluran pengumpulan dalam sistem distribusi.	Kenaikan angka tahunan maksimum yang diperbolehkan untuk saluran pengumpulan adalah 14,37	Gangguan per 100 kms	90
<b>Outputs</b>				
4	Peningkatan jumlah panjang jalur distribusi MV yang terpasang	Tingkat minimum kumulatif terinstal panjang jalur MV adalah 63.692	Kms	120
5	Pembangkit Listrik Tambahan dari Energi Terbarukan	Tingkat minimum tambahan MWh setiap tahun adalah 40.000 MWh dan tambahan 48.000 MWh pada tahun 2025	MWh	50
<i>Hibah ACEF</i>		<i>tambahan MWh setiap tahun adalah 40.000 MWh pada tahun 2025</i>	<i>MWh</i>	3
6	Peningkatan Pengelolaan aset dan limbah meningkat, dengan (i) 90% material bekas milik PLN di Kalimantan, Maluku dan Papua termasuk dalam inventaris pembuangan pada akhir 2019 dibuang dengan aman pada tahun 2025, dan (ii) 25 gudang yang memiliki dokumen lingkungan pada tahun 2024	Material PLN bekas dibuang dengan aman setidaknya 90% pada tahun 2024	%	65
7	Lokakarya pendidikan konsumen tentang penggunaan energi yang aman dan produktif	PLN mengadakan workshop masing-masing 5 UIW dan 29 UP3 dengan minimal 30% partisipasi perempuan (1,0 poin) atau 50% partisipasi perempuan (1,25 poin), total 121 poin pada tahun 2024	poin	30
8	Mengintegrasikan E-Procurement dan sistem SAP	Kedua sistem terintegrasi dan diluncurkan, dan setidaknya 80% dari kontrak dalam nilai finansial pada tahun 2024		20
<b>TOTAL (Loan only)</b>				<b>600</b>
<b>TOTAL (Grant)</b>				<b>6</b>

PLN akan menerapkan dan juga mengawasi, memantau, dan melaporkan kemajuan dalam program RBL ADB ini yang memiliki delapan indikator terkait pencairan (DLI), tiga indikator terkait non-pencairan (non-DLI), Kepatuhan Pinjaman dan Hibah, dan Rencana Aksi Program (PAP).

## 2.2 Pengelolaan dan Pelaksanaan Program PLN

PLN membentuk *Project Management Unit* (PMU) dan *Project Implementation Unit* (PIU) khusus untuk program RBL ADB di PLN Kalimantan, Maluku, dan Papua. PMU terdiri dari pegawai internal PLN yang berasal dari berbagai divisi di Kantor Pusat PLN (misalnya Regional Sumkal, Regional Sulmapana, DIV RKO, DIV MRP, DIV K3L, dll). Struktur organisasi PMU dan PIU ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini.

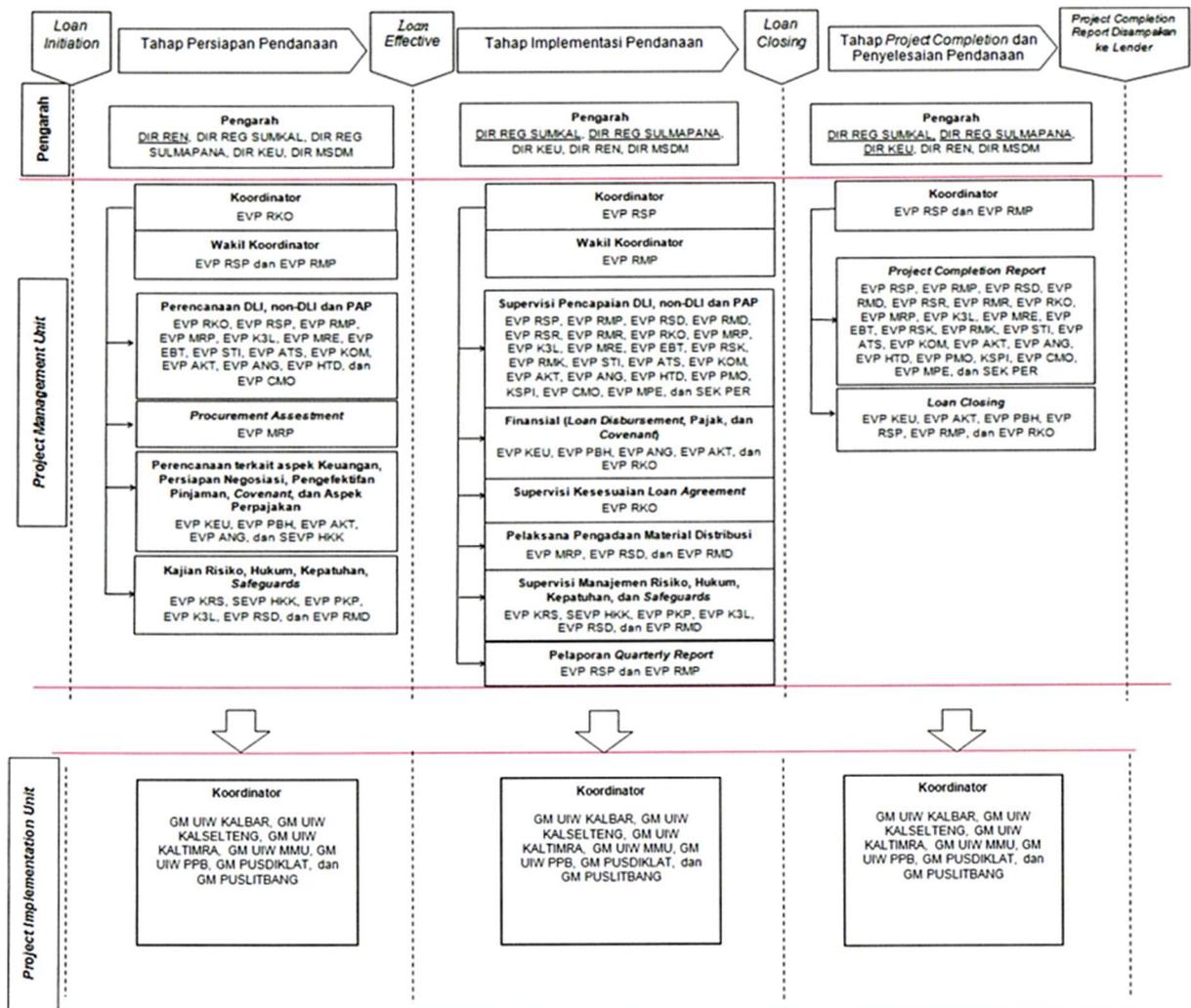


Figure 1: Struktur Organisasi PMU/PIU (Sumber: PLN)

### 3. STATUS PELAKSANAAN PROGRAM RBL ADB

#### 3.1 Ringkasan Pencapaian DLI pada Periode Pelaporan

Tabel 3 menunjukkan ringkasan Pencapaian DLI Periode Laporan Tahun 2021 dari hasil evaluasi PLN.

**Table 3: Ringkasan Pencapaian DLI tahun 2020 (pencapaian terlambat) dan 2021 (pencapaian saat ini) RBL-ADB**

DLI No.	Target 2020/2021	Review PLN (per 31 Dec 2021)	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	6,12 juta pelanggan (2021)	6,25 juta (data TUL 309 dan AP2T)	Tercapai
2.1	51.808 KK miskin (2021)	62.413 poor households (Data dari AP2T – Info DTKS)	Tercapai
2.2	5.181 KK miskin perempuan (2021)	11.974 poor households (Data from AP2T – DTKS Information)	Tercapai
3	16,41/100 kms gangguan permanen (2021)	4,27 / 100 kms	Tercapai
4	56.685 kms jaringan TM untuk KMP (2021)	55.762,79 kms	Tidak Tercapai
5 (2020 i)	Daftar aset EBTKE yang akan dialihkan ke PLN, diselesaikan oleh PLN (2020 i)	PLN sudah menyampaikan konfirmasi ke EBTKE	Tidak Tercapai
5 (2020 ii)	Model KSO atau perangkat hukum lain dengan PEMDA yang disetujui oleh otoritas terkait di lingkungan PLN (2020 ii)	Draf model KSO belum disetujui	Tidak Tercapai
5 (2021, 5.1)	Tambahan energi EBT MWh sebesar 9.600 MWh (2021)	2.449,6 MWh	Tidak Tercapai
6 (2020 ii)	5 Gudang mendapatkan dokumen lingkungan yang disetujui dari Badan Regulasi terkait (2020 ii)	Target 2020 (ii) tercapai sepenuhnya di Tahunan 2021 ini. Tiga UIW mendapatkan dokumen lingkungan yang disetujui pada semester I 2021. dan dua tambahan dicapai pada semester II 2021	Tercapai
6 (2021 i)	20% dari inventaris 2019 disetujui oleh KBUMN (2021 i)	0% disetujui oleh KBUMN	Tidak Tercapai
6 (2021 ii)	10 gudang kumulatif mengamankan dokumen lingkungan yang disetujui dari badan pengatur terkait (2021 ii)	7 gudang memiliki 4 SPPL dengan checklist gudang dan 3 DPLH	Tidak Tercapai
7	5 Workshop Edukasi Konsumen di masing-masing dari 5 UIW dengan min. 30% perempuan (2020 ii);  29 Workshop Edukasi Konsumen tingkat UP3 (29 UP3s) (2021), Setara 34 poin (minimal 30% partisipasi	30 Workshop (3 UIW + 27 UP3) 33,75 poin	Tercapai

DLI No.	Target 2020/2021	Review PLN (per 31 Dec 2021)	Tercapai/ Tidak Tercapai
	perempuan untuk setiap workshop) (2021)		
8	Paling sedikit 50% dari kontrak dalam nilai keuangan yang dilaksanakan oleh UIW (termasuk unit di bawahnya) tercatat dalam sistem E-Proc+SAP (2021)	55,79%	Tercapai
Non-DLI 1	Penilaian dari PLN tentang peningkatan penggunaan waktu yang dilaporkan oleh perempuan dan laki-laki sebagai akibat dari akses ke listrik (2020)	Proses Pengadaan	At risk
Non-DLI 2	Paling sedikit satu pelatihan percontohan berbasis komunitas tentang pemeliharaan PV surya diberikan dengan minimal 30% partisipasi perempuan (2020-2022)	0 Pelatihan komunitas percontohan Materi pelatihan dari pemeliharaan dasar PLTS telah disiapkan oleh PLN Pusdiklat	2020-2022
Non-DLI 3	Laporan tahunan tentang dampak sosial dari elektrifikasi (2022)	0 Laporan tahunan	Dimulai dari 2022

### 3.2 Kelayakan Pencairan Kinerja 2020 dan Semester I 2021 (Juta USD)

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja DLI tahun 2020, total kelayakan pencairan pinjaman sebesar USD 75,22 juta, dan pencapaian kinerja DLI interim tahun 2021 total kelayakan pencairan pinjaman sebesar USD 95,80 juta dengan rincian sebagai berikut:

**Table 4: Ringkasan Kelayakan Pencairan Kinerja (Sumber: ADB)**

Disbursement-Linked Indicator	Alokasi Total	Prior Results	Pencapaian 2020	Pencapaian Semester I 2021
<b>DLI 1:</b> Jumlah Pelanggan PLN in Kalimantan, Maluku and Papua	150	-	28,33 (partial)	21,65
<b>DLI 2:</b> Tambahan 112.428 rumah tangga miskin yang mendapatkan listrik PLN pada tahun 2024, dengan data dipilah berdasarkan KK perempuan/laki-laki	75	30	0	54,42
2.1. semua KK miskin	60	25	0	40,08
2.1. Semua KK miskin (JFPR Grant)	3	0,6	0	2,7
2.2. KK miskin perempuan	15	5	0	14,34
<b>DLI 3:</b> Gangguan permanen saluran pengumpan dalam sistem distribusi berkurang	90	-	18	
<b>DLI 4:</b> Panjang jalur distribusi TM yang terpasang meningkat	120	-	24,89	7,93
<b>DLI 5:</b> Pembangkit listrik dari PV surya (<10 MW), mini/mikro hidro (<1 MW), dan	50	-	0	0

Disbursement-Linked Indicator	Alokasi Total	Prior Results	Pencapaian 2020	Pencapaian Semester I 2021
pembangkit biogas kecil (<100 kW) meningkat				
5.1. Tambahan 40.000 MWh setiap tahun pada tahun 2025 berdasarkan RUPTL 2019	30	-	0	0
5.1. Tambahan 40.000 MWh per tahun pada tahun 2025 (Hibah ACEF)	3	-	0	0
5.2 Tambahan lebih lanjut 48.000 MWh setiap tahun pada tahun 2025	20	-	-	0
<b>DLI 6:</b> Manajemen aset dan limbah ditingkatkan	65	-	0	8,8
<b>DLI 7:</b> Pada tahun 2024, lokakarya pendidikan konsumen tentang penggunaan energi yang aman dan produktif dilaksanakan di 5 UIW dan di tingkat UP3	30	-	0	3
<b>DLI 8.</b> Sistem E-Procurement dan SAP terintegrasi	20	4	4	
<b>TOTAL (Hanya pinjaman)</b>	600	34	\$ 75,22 M	\$ 95,80 M
<b>TOTAL (Hibah)</b>	6	0,6	0	\$ 1,95 M

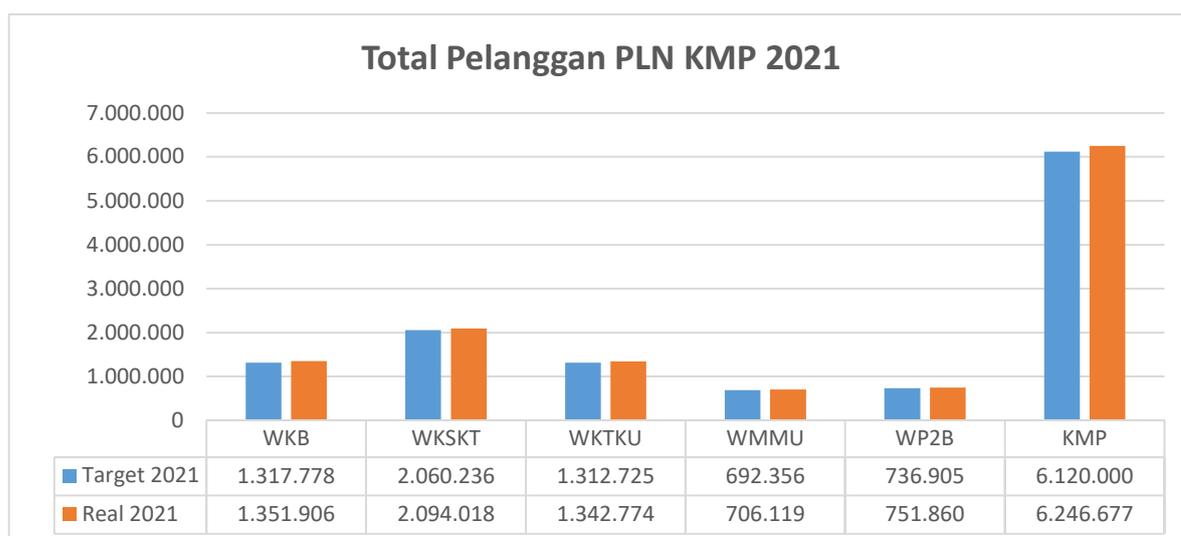
### 3.3 Indikator Terkait Pencairan (DLIs)

#### 3.3.1 RBL DLI 1: Peningkatan Jumlah Total Pelanggan PLN

Per Desember 2021, PLN memiliki jumlah pelanggan sekitar 6,25 M di Kalimantan, Maluku dan Papua, yang mana dari target RBL ADB sebesar 6,12 M untuk tahun 2021. Data untuk indikator ini diambil dari sistem SILM yang telah link terintegrasi ke database pelanggan PLN (AP2T).

**Table 5: Total Pelanggan KMP 2021**

No	UNIT	TOTAL PELANGGAN		
		TARGET 2020	TARGET 2021	REALISAI 2021
1	WKB	1.282.289	1.317.778	1.351.906
2	WKSKT	2.004.753	2.060.236	2.094.018
3	WKTKU	1.277.373	1.312.725	1.342.774
4	WMMU	666.008	692.356	706.119
5	WP2B	711.537	736.905	751.860
	<b>KALIMANTAN</b>	<b>4.564.415</b>	<b>4.690.739</b>	<b>4.788.698</b>
	<b>MALUKU DAN PAPUA</b>	<b>1.377.545</b>	<b>1.429.261</b>	<b>1.457.979</b>
	<b>KMP</b>	<b>5.941.961</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.246.677</b>



**Figure 2: Jumlah Total Pelanggan PLN KMP Tahun 2021**

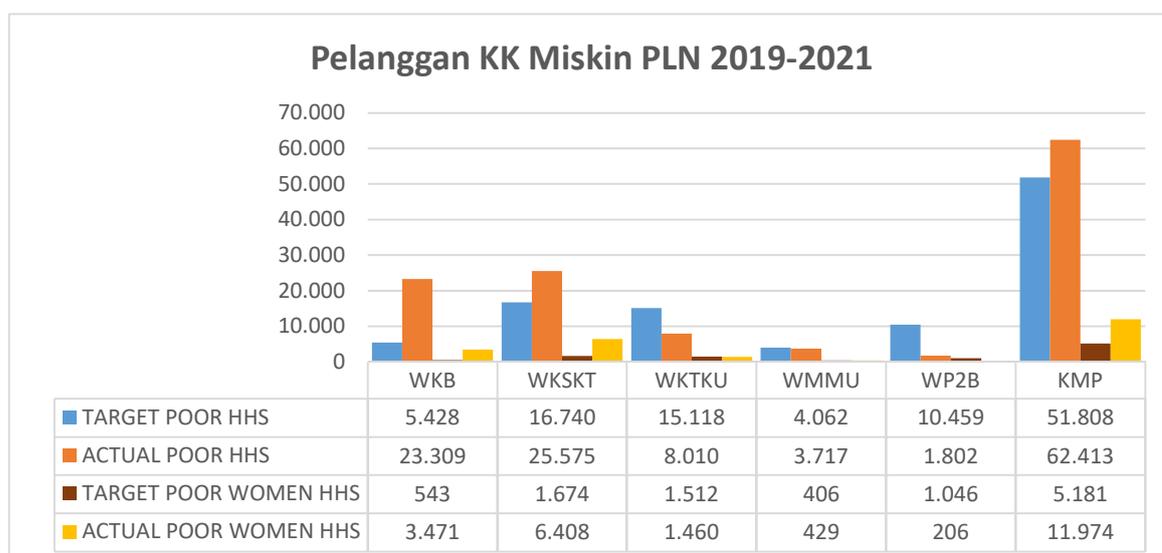
Pencapaian tahun 2021 sekitar 102,1% jika dibandingkan dengan target penuh tahun 2021.

### 3.3.2 RBL DLI 2: Peningkatan Jumlah Kepala Keluarga Miskin

Data untuk ADB RBL DLI 2 diambil dari sistem AP2T pada semua kesesuaian info DTKS dan dihitung dari tahun 2019 sampai dengan Desember 2021 secara manual karena penyaringan untuk data duplikat yang muncul. Mekanisme perhitungannya telah disetujui oleh IVA dan ADB pada interim mission review 2021 sehingga untuk realisasi tahun 2019 hingga Desember 2021 terdapat 62.413 KK miskin dan 11.974 diantaranya adalah KK perempuan. Berdasarkan kompilasi data yang diunduh dari AP2T-Info DTKS 2019 sampai dengan Desember 2021 adalah sebagai berikut::

**Table 6: Data informasi DTKS pada AP2T-Info DTKS tahun 2019 sd Desember 2021**

No	UNIT	PANAMBAHAN KK MISKIN			PANAMBAHAN KK MISKIN PEREMPUAN		
		TARGET 2020	TARGET 2021	REAL 2021	TARGET 2020	TARGET 2021	REAL 2021
1	WKB	2.997	5.428	23.309	300	543	3.417
2	WKSKT	10.766	16.740	25.575	1.077	1.674	6.408
3	WKTKU	9.618	15.118	8.010	962	1.512	1.460
4	WMMU	2.440	4.062	3.717	244	406	429
5	WP2B	3.593	10.459	1.802	359	1.046	206
	<b>KALIMANTAN</b>	<b>23.380</b>	<b>37.286</b>	<b>56.894</b>	<b>2.338</b>	<b>3.729</b>	<b>11.339</b>
	<b>MALUKU DAN PAPUA</b>	<b>6.033</b>	<b>14.521</b>	<b>5.519</b>	<b>603</b>	<b>1.452</b>	<b>635</b>
	<b>KMP</b>	<b>29.414</b>	<b>51.808</b>	<b>62.413</b>	<b>2.941</b>	<b>5.181</b>	<b>11.974</b>



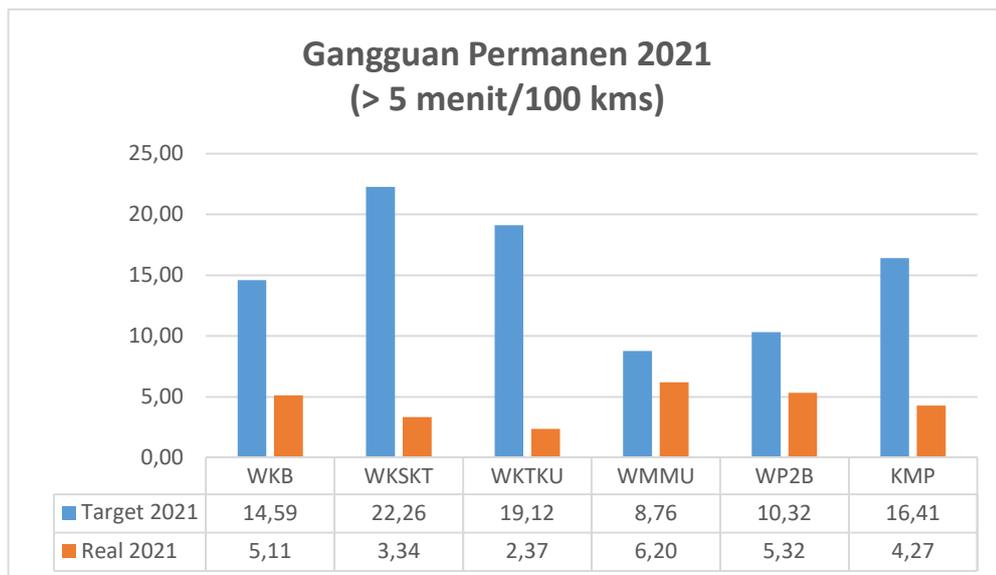
**Figure 3: Tambahan pelanggan Rumah Tangga Miskin pada tahun 2021**

### 3.3.3 RBL DLI 3: Gangguan Permanen Jaringan TM

Jumlah gangguan JTM permanen yang dilaporkan oleh KMP selama periode tahun 2021 adalah 4,27 gangguan > 5 menit per 100 kms, dimana dari target ADB RBL sebesar 16,41 gangguan per 100 kms untuk tahun 2021 sekitar 26% (polaritas negatif) . Data untuk DLI ini diambil dari SILM, meskipun sumber data diisi dari Distribution Control Center dari masing-masing PLN Wilayah.

**Table 7: Gangguan Permanen Jaringan TM**

No	UNIT	FGTM	
		TARGET 2021	REAL 2021
1	WKB	14,59	5,11
2	WKSKT	22,26	3,34
3	WKTKU	19,12	2,37
4	WMMU	8,76	6,20
5	WP2B	10,32	5,32
	<b>KALIMANTAN</b>	<b>19</b>	<b>3,71</b>
	<b>MALUKU DAN PAPUA</b>	<b>9,48</b>	<b>5,80</b>
	<b>KMP</b>	<b>16,41</b>	<b>4,27</b>



**Figure 4: Permanent Interruption in 2021**

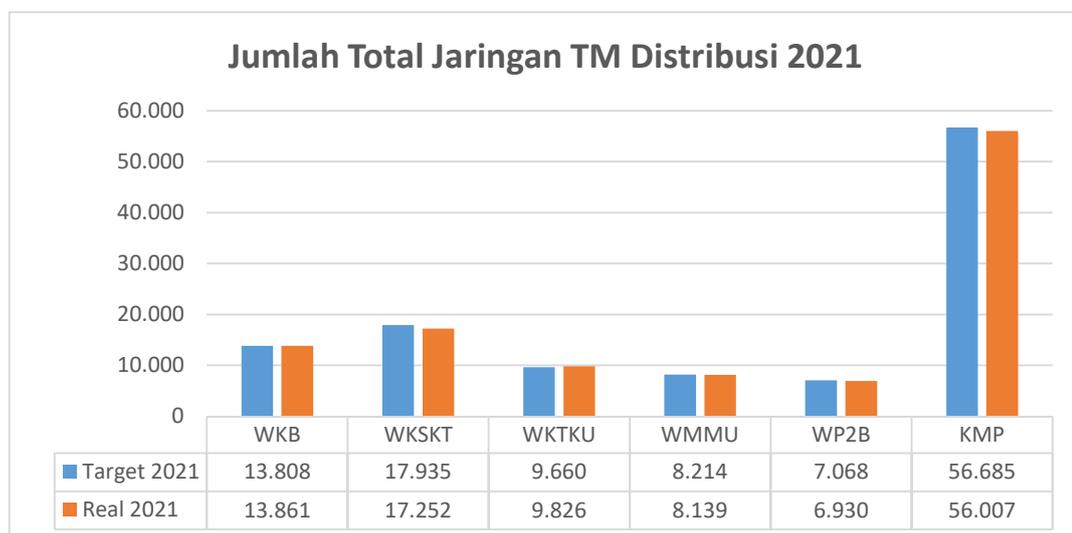
### 3.3.4 RBL DLI 4: Pamjang Tambahan Jalusr Distribusi TM

Total panjang aset jaringan distribusi tegangan menengah (MV) terpasang selama tahun 2021 setelah dikurangi pengurangan interim 2021 (244,35 ckm) adalah 55.762,79 ckm karena ada beberapa rencana kerja yang masuk ke wilayah KBA dan/atau IP, yang mana dari target ADB RBL 2021 56.685 ckm. Pencapaian pada tahun 2021 dibandingkan dengan target penuh adalah sekitar 98,4%. Target tahun 2021 diproyeksikan tercapai pada Semester 2 2022.

Data untuk DLI ini diambil dari SILM, meskipun data sumber diisi secara manual dengan input dari masing-masing PLN Wilayah.

**Table 8: Additional length of medium voltage distribution lines in 2021**

UNIT	JTM Total (kms)		
	TARGET 2020	TARGET 2021	ACTUAL 2021
WKB	13.214	13.808	13.861
WKSKT	16.991	17.935	17.252
WKTKU	9.331	9.660	9.826
WMMU	7.981	8.214	8.139
WP2B	6.367	7.068	6.930
<b>KALIMANTAN</b>	<b>39.537</b>	<b>41.403</b>	<b>40.938</b>
<b>MALUKU DAN PAPUA</b>	<b>14.348</b>	<b>15.282</b>	<b>15.069</b>
<b>KMP</b>	<b>53.885</b>	<b>56.685</b>	<b>56.007</b>
<b>JTM exclusion</b>			<b>244,35</b>
<b>KMP Net Total</b>			<b>55.762,79</b>



**Figure 5: Jumlah Total Jalur MV Distribusi Tahun 2021**

### 3.3.5 RBL DLI 5: Promosi Energi Hijau

Target promosi energi hijau pada tahun 2020 (i) adalah Daftar aset EBTKE yang akan dialihkan ke PLN yang telah diselesaikan oleh PLN dan tahun 2020 (ii) Model KSO atau instrumen hukum

lainnya dengan PEMDA yang disetujui oleh otoritas terkait di lingkungan PLN. PLN mengirimkan surat kepada ESDM tertanggal 26 Oktober 2021 perihal Pengajuan Tindak Lanjut PLT EBT Untuk Pengalihan Aset Melalui PMPP PT PLN (Persero).

DIV HKK menyampaikan Surat Resmi kepada DIV RSP No. 50973/HKM.05.03/SEVP HKK/2021 tentang Penyampaian Rancangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan PLTS antara PLN dengan Pemerintah Daerah (Oktober 2021). DIV RSP menyampaikan Surat Resmi kepada DIV EBT No. 58992/KEU.01.08/EVP RSP/2021 perihal Permintaan Peninjauan dan Tindak Lanjut Usulan Pengesahan Rancangan Template Perjanjian Kerjasama (PKS/KSO) PLTS antara PLN dan Pemerintah Daerah Hasil Hukum DIV Ulasan HKK. DIV EBT diharapkan untuk menyelesaikan tinjauan pada Februari 2022 tetapi kemungkinan hingga Maret 2022. Model KSO dengan Pemerintah Daerah akan diserahkan kepada Direktur PLN pada Juni 2022 untuk disetujui.

Target promosi energi hijau tahun 2021 adalah produksi tahunan dari baseline 2018 sebesar 3.309 MWh dan target tahun 2021 sebesar 9.600 MWh, serta target tambahan tahun 2021 sebesar 4.000 MWh. Total realisasi produksi EBT untuk klasifikasi jenis dan kapasitas PLTS <10 MW, MHP <1 MW, dan PLTBio <100 kW (total kit capacity) pada tahun 2021 adalah 2.449,6 MWh. Pencapaian produksi energi EBT tahun 2021 sebesar 73,87% dari produksi energi EBT tahun 2018 (baseline), sehingga belum bisa masuk target tahun 2021. Pada 2022, Kalimantan berencana merevitalisasi aset Solar PV yang tidak beroperasi dan menurun di UIW Kalbar dan UIW Kaltimra. UIW Kalbar direncanakan di tiga lokasi yaitu di Pulau Sidding, Temajuk, dan Limbung, sedangkan UIW Kaltimra berada di Derawan Solar PV. PLTS Derawan (Kaltimra) saat ini mengalami penurunan kapasitas menjadi 100 kWp dari sebelumnya 170 kWp pada awal operasi. Dengan revitalisasi dan penambahan kapasitas ini diharapkan unit dapat beroperasi lebih baik. Berdasarkan riwayat operasi, produksi energi tahunan PLTS Derawan dengan kapasitas 170 kWp adalah 38,17 - 55,73 MWh. Sementara itu, PLTS Temajok, PLTS Pulau Limbung, dan PLTS Sidding saat ini tidak beroperasi. Dalam revitalisasi aset ini, 3 Solar PV akan diperbaiki dan dilakukan penambahan kapasitas (PLTS Pulau Limbung dan PLTS Sidding). Berdasarkan data operasional Kalimantan Barat, perkiraan produksi energi bulanan untuk PLTS Temajuk adalah 601,02 MWh/tahun, PLTS Pulau Limbung 414,72 MWh/tahun, dan PLTS Sidding 64,80 MWh/tahun. Proses saat ini adalah pengajuan dan review penerbitan anggaran.

**Table 9: Produksi EBT Tahun 2021**

UIW	Jenis EBT	Pemilik	Total Unit	Total Kapasitas Terpasang (kW)	Total Produksi Energi (kWh)
UIKL KAL	PV	PLN	1,00	340,00	132.328,00
UIKL KAL	PV	Sewa	3,00	450,00	28.578,12
UIW KALBAR	Hydro	PLN	3,00	525,00	358.480,00
UIW KALBAR	PV	PLN	3,00	180,00	0,00
UIW KALTIMRA	Hydro	Sewa	1,00	0,00	0,00

UIW	Jenis EBT	Pemilik	Total Unit	Total Kapasitas Terpasang (kW)	Total Produksi Energi (kWh)
UIW KALTIMRA	PV	PLN	1,00	90,00	23.864,10
UIW KALTIMRA	PV	Sewa	3,00	300,00	0,00
UIW MMU	PV	PLN	12,00	2.410,00	45.938,00
UIW P2B	Hydro	PLN	1,00	720,00	628.819,78
UIW P2B	PV	PLN	61,00	5.707,00	1.231.639,62
<b>Grand Total</b>			<b>89,00</b>	<b>10.722,00</b>	<b>2.449.647,62</b>

### 3.3.6 RBL DLI 6: Manajemen Aset dan Limbah

Tata cara pengelolaan penghapusan aset mengikuti tata cara Surat Keputusan Direktur No. 015.E/870/DIR/1998 tentang Penarikan Aset Operasional Menjadi Aset Non Operasional, Surat Keputusan Direktur No. 1233/DIR/2011 tentang Tata Cara Penghapusan dan Transfer. Aset Tetap PT PLN (Persero), Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Perubahan Anggaran Dasar PL PLN (Persero), dan Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) 48091/LOG.0103/C01070000/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Tentang Pemberian Persetujuan Penghapusan AT/ATTB dan Perubahan Alur Proses Bisnis Penghapusan AT/ATTB Pada Kantor pusat. Peralatan Bekas Kategori Limbah B3 (ATTB) yang telah dikeluarkan dari aset operasional akan dikelola sebagai Limbah B3. PLN DIV K3L telah menyiapkan Rancangan Keputusan Direktur Pengelolaan Limbah B3 yang telah diajukan ke Bagian Hukum untuk ditinjau. Akibat pandemi, SPI sulit melakukan pengecekan fisik ATTB di UIW.

Keterlambatan pencapaian tahun 2020 (ii) target 5 gudang telah menerima dokumen lingkungan yang disetujui dari instansi terkait untuk semester I tahun 2021, 3 dari 5 gudang telah terpenuhi, sedangkan 2 sisanya telah tercapai pada semester II tahun 2021.

Target Pengelolaan Aset dan Limbah pada tahun 2021 adalah usulan penghapusan KMP ATTB telah dihapusbukukan sebesar 20% dari saldo per 31 Desember 2019 (Baseline). Sedangkan target kepemilikan dokumen lingkungan di gudang material Bekasi pada tahun 2021 adalah 10 dokumen lingkungan SPPL, UKL/UPL, atau DPLH. Khusus untuk dokumen SPPL lingkungan, diperlukan pengisian formulir pemeriksaan gudang limbah baik dengan aplikasi Zite maupun manual.

Usulan UIW di KMP yang sudah dijadikan target yang sudah diajukan ke PLN Pusat sebesar Rp. 13,5 miliar.

**Table 10: 2019 Inventarisasi Material Bekas Untuk Penghapusbukuan**

No.	UIW	Tipe Material dihapuskan	Nilai (IDR)	Status Proses
1	UIW Kalselteng	Jarinagan distribusi (transformers, logam, dll)	876.858.608	Diproses ke Dewan Komisaris untuk melakukan pemeriksaan fisik aset secara online atau offline
2	UIW Kalbar	Jarinagan distribusi (transformers, logam, dll)	2.673.423.570	GRC (Governance Risk & Compliance) direview di PLN Pusat
		Gardu Distribusi	3.761.626.382	
3	UIW Kaltimra	Jarinagan distribusi (transformers, logam, dll)	4.637.717.867	Diproses ke Dewan Komisaris untuk melakukan pemeriksaan fisik aset secara online atau offline
4	UIW MMU	Jarinagan distribusi (transformers, logam, dll)	157.772.719	Pengajuan usulan Pelepasan Aset kepada Divisi Pengawasan (Daerah)
5	UIW P2B	Distribusi	1.452.319.280	GRC (Governance Risk & Compliance) direview di PLN Pusat
<b>Total</b>			<b>13.559.718.426</b>	

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, usulan penghapusan ATTB dari UIW telah diajukan ke Kantor Pusat (DIV AKT) dengan total nilai usulan Rp. 13,5 miliar (khusus nilai Distribusi) pada tahun 2021 prosesnya seperti terlihat pada Tabel 10 di atas, dan mendapat perhatian lebih dari program ini adalah distribusi aset. Berdasarkan informasi status DIV AKT hingga triwulan IV 2021 UIW Kalselteng dan UIW Kaltimra telah mencapai tahap akhir dalam proses evaluasi Dekom (Rp 5,51 miliar (40,67%), untuk UIW Kalbar dan P2B UIW masih dalam proses evaluasi GRC. MMU UIW masih dalam tahap rekomendasi ke Coach Division (RMD). Estimasi proses GRC review dan pemeriksaan fisik untuk persetujuan Dewan Komisaris diperkirakan memakan waktu 2 bulan sehingga kemungkinan akan selesai pada Mei 2022. Namun tahap akhir ini perlu dilakukan amandemen Loan agreement dimana tahap akhir sebelumnya untuk persetujuan penghapusbukuan di KBUMN menjadi BoC atau KBUMN.

DLI 6 (ii) menargetkan 25 gudang material bekas memiliki dokumen lingkungan dan mendapatkan persetujuan dari Badan Regulasi Terkait pada tahun 2024. Pada tahun 2020, 3 gudang material bekas telah menyerahkan dokumen lingkungan (1 DPLH dan 2 SPPL) dan disetujui oleh DLH tetapi untuk kegiatan yang dilengkapi dengan Dokumen SPPL lingkungan

belum dilengkapi dengan checklist gudang. Pada tahun 2021 PLN secara intens berkoordinasi untuk dapat mempercepat proses penerbitan dokumen lingkungan yang dikonfirmasi dan disetujui oleh Badan Regulasi terkait untuk dokumen lingkungan SPPL harus dilengkapi dengan checklist gudang. Secara kumulatif hingga triwulan IV tahun 2021, 8 penerbitan dokumen lingkungan di gudang bahan bekas memiliki SPPL/DPLH yang telah diajukan dan disetujui oleh DLH dan telah dilengkapi dengan checklist gudang. Kedelapan dokumen lingkungan tersebut berasal dari UP3 Pontianak (Cemara WH) dan UP3 Ketapang (Sampit WH) di UIW Kalimantan Barat, UP3 Samarinda (ULP Ulu WH) dan UP3 Kaltara (ULP Tarakan WH) di UIW Kaltimra, UP3 Ambon (Lateri WH) di UIW MMU, dan UP3 Manokwari (Manokwari WH), UP3 Sorong (Sorong WH) di UIW P2B. Tabel 11 menunjukkan pencapaian dokumen lingkungan gudang di UIW.

**Table 11: Pencapaian Izin Lingkungan Gudang pada RBL-ADB 2021**

No	UIW dan UP3	Ijin Lingkungan 2019 – TW IV 2021		
		Jumlah	Tipe Dokumen Lingkungan	Tanggal Terbit
1	<b>Sub-total Kalselteng</b>	<b>0</b>		
2	UP3 Samarinda, G. ULP Ulu	1	DPLH	6 April 2021
	UP3 Kaltara, G. ULP Tarakan	1	SPPL	5 Sept 2019
	<b>Sub-total Kaltim</b>	<b>2</b>		
3	UP3 Pontianak, G. Cemara	1	DPLH	2 July 2021
	UP3 Ketapang, G. Sampit	1	DPLH	13 Dec 2021
	<b>Sub-total Kalbar</b>	<b>2</b>		
4	UP3 Ambon, G. Lateri	1	SPPL	11 May 2020
	<b>Sub-total Maluku &amp; Maluku Utara</b>	<b>1</b>		
5	UP3 Manokwari, G. Manokwari	1	SPPL	10 Sept 2021
	UP3 Sorong, G. Sorong	1	SPPL	11 Nov 2021
	<b>Sub-total Papua &amp; Papua Barat</b>	<b>2</b>		
<b>Kumulatif Total</b>		<b>7</b>		

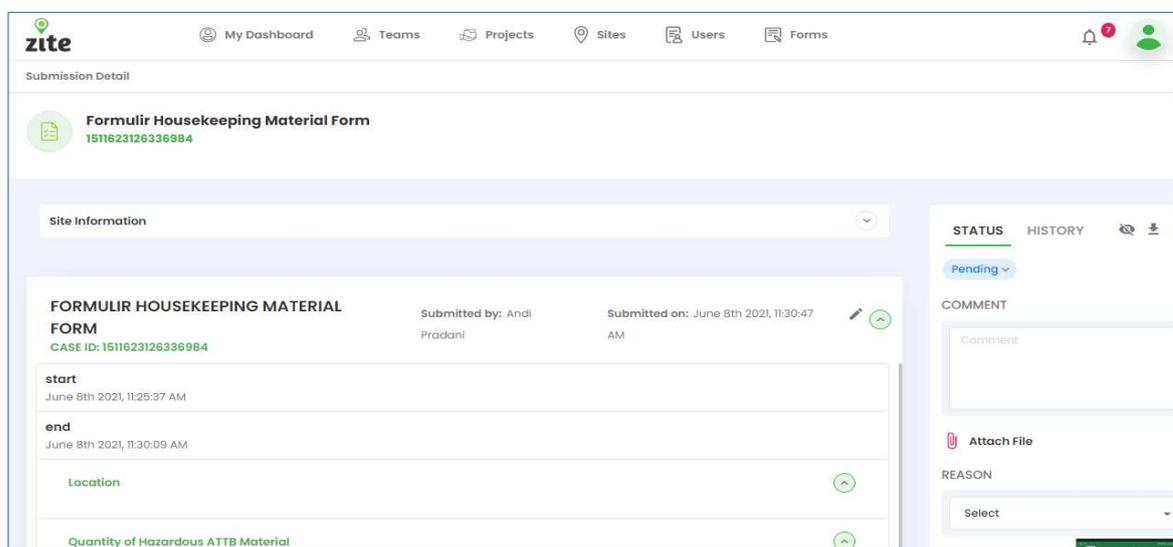
Total pencapaian 7 (tujuh) gudang memiliki dokumen lingkungan yang telah diserahkan dan disetujui oleh DLH. Dari target tahun 2021, 10 (sepuluh) gudang memiliki dokumen lingkungan yang setara dengan pencapaian 70%.

DIV K3L telah mengembangkan checklist gudang material bekas dari manual ke digital berbasis aplikasi dan web bekerja sama dengan Zite Platform. Dalam aplikasi ini, unit induk memungkinkan untuk mengirimkan hasil checklist gudang dan berbagi lokasi gudang. Sebagai fungsi evaluasi, aplikasi telah merancang sistem pemantauan dan persetujuan bertingkat sesuai dengan kewenangannya. Gudang dengan dokumen SPPL lingkungan harus sesuai dengan checklist dan akan dievaluasi dua kali setahun (per semester). Namun masih ditemukan

kendala operasional dalam penggunaan aplikasi sehingga formulir manual sebelumnya tetap digunakan hingga penggunaan aplikasi berjalan dengan baik.

**Table 12 Daftar Periksa untuk Gudang Material Bekas (Eksisting)**

FORM HOUSEKEEPING MATERIAL ATTB YANG MENGANDUNG LB3												
No.	Jenis ATTB yang Mengandung LB3 (Trafo, Kapasitor, dll)	Jumlah	Lokasi Penyimpanan			Fasilitas Penyimpanan						
			Nama Gudang	Koordinat	Luas Area (m2)	Tidak bercampur dgn material lainnya (ya / tidak)	Pemisahan trafo dari tahun manufaktur <1997 dan >1997 (ya / tidak)	Pemisahan kapasitor sesuai merk dagang (ya / tidak)	Eviden (Foto)	Memiliki atap / penutup (tidak terkena hujan) (ya / tidak)	Eviden (Foto)	Terdapat ceceran oli/minyak trafo (ya / tidak)



**Figure 6: Manajemen gudang untuk Gudang Material Bekas Berbasis Aplikasi dan Web**

### 3.3.7 RBL DLI 7: Consumer Education

Definisi indikatornya adalah mengadakan workshop edukasi konsumen tentang penggunaan energi yang aman dan produktif yang akan dilaksanakan oleh 5 UIW dan 1 UP3 masing-masing UIW pada tahun 2021 dengan minimal partisipasi 30% perempuan untuk setiap workshop. Progres TW III tahun 2021 adalah pengembangan materi pelatihan oleh PLN Pusdiklat selesai pada 27 September 2021 dan PLN Pusdiklat menyampaikan materi workshop akan selalu update pada link yang disediakan PLN PUSDIKLAT karena materi edukasi akan berubah secara dinamis. berdasarkan referensi materi dari ADB dan materi pelatihan telah dibagikan dengan UIW. Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Batch 1 di Kalimantan dan Batch 2 di Maluku-Papua telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Batch 3 untuk Kalimantan dan Maluku-Papua untuk menampung peserta yang berhalangan hadir. Batch sebelumnya pada Oktober 2021. Workshop dilaksanakan pada pada TW III 2021 dengan capaian dari 5 UIW di KMP terealisasi 3 UIW dan dari 29 UP3 terealisasi 27 UP3, Berdasarkan perhitungan mandiri Regional diperoleh yang memenuhi syarat pencapaiannya adalah 30 workshop dari target tahun 2021 sebanyak 34 workshop. Workshop

dengan jumlah peserta satu UIW/UP3 > 50% bernilai 1,25 poin yaitu 15 unit dan sisanya 15 unit bernilai 1 poin sehingga total 33,75 poin.

**Table 13 Implementasi Workshop Edukasi Pelanggan**

Unit Induk	Unit Area	Implementasi WORKSHOP				Nilai	30% ≤ P < 50%	P ≥ 50%
		P	L	Total	Prosesntase Partisipasi Perempuan			
PT PLN (PERSERO) UIW KSKT	Kantor Wilayah	71	37	108	65,74%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW KSKT	UP3 Banjarmasin	103	121	224	45,98%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW KSKT	UP3 Barabai	194	153	347	55,91%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW KSKT	UP3 Kotabaru	56	51	107	52,34%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW KSKT	UP3 Kuala kapuas	204	113	317	64,35%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW KSKT	UP3 Palangkaraya	139	148	287	48,43%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW KALBAR	Kantor Wilayah	65	40	105	61,90%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW KALBAR	UP3 Pontianak	50	70	120	41,67%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW KALBAR	UP3 Singkawang	54	71	125	43,20%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW KALBAR	UP3 Sanggau	53	66	119	44,54%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW KALBAR	UP3 Ketapang	82	27	109	75,23%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW KTKU	Kantor Wilayah			0	0,00%	0		
PT PLN (PERSERO) UIW KTKU	UP3 Balikpapan	34	78	112	30,36%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW KTKU	UP3 Samarinda	56	51	107	52,34%	1,25	1	
PT PLN (PERSERO) UIW KTKU	UP3 Bontang	35	42	77	0,00%	0		
PT PLN (PERSERO) UIW KTKU	UP3 Berau			0	0,00%	0		
PT PLN (PERSERO) UIW KTKU	UP3 Kaltara	33	67	100	33,00%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW MMU	Kantor Wilayah			0	0,00%	0		
PT PLN (PERSERO) UIW MMU	UP3 Ambon	66	39	105	62,86%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW MMU	UP3 Masohi	37	83	120	30,83%	1	1	

Unit Induk	Unit Area	Implementasi WORKSHOP				Nilai	30% ≤ P < 50%	P ≥ 50%
		P	L	Total	Prosesntase Partisipasi Perempuan			
PT PLN (PERSERO) UIW MMU	UP3 Tual	43	59	102	42,16%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW MMU	UP3 Saumlaki	63	49	112	56,25%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW MMU	UP3 Ternate	45	85	130	34,62%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW MMU	UP3 Sofifi	33	75	108	30,56%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW MMU	UP3 Tobelo	58	66	124	46,77%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW P2B	Kantor Wilayah	65	53	118	55,08%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW P2B	UP3 Jayapura	35	80	115	30,43%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW P2B	UP3 Sorong	31	70	101	30,69%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW P2B	UP3 Manokwari	90	33	123	73,17%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW P2B	UP3 Timika	95	45	140	67,86%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW P2B	UP3 Merauke	53	51	104	50,96%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW P2B	UP3 Biak	94	51	145	64,83%	1,25		1
PT PLN (PERSERO) UIW P2B	UP3 Wamena	32	73	105	30,48%	1	1	
PT PLN (PERSERO) UIW P2B	UP3 Nabire	57	55	112	50,89%	1,25		1
TOTAL						<b>33,75</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Selain itu, pelaksanaan workshop akan dipadukan dengan program sosialisasi komersial di UIW dan UP3 dengan tetap memperhatikan syarat pengakuan workshop oleh IVA/ADB dan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Sehingga pelaksanaan workshop bisa dilakukan via online.

### 3.3.8 RBL DLI 8: Integrasi Sistem E-Procurement and SAP

Target integrasi Sistem E-Procurement dan SAP pada tahun 2021 adalah sistem E-Procurement dan SAP telah terintegrasi dan diluncurkan pada tahun 2020. Sistem E-Proc & SAP telah terintegrasi pada tahun 2019. Pada bulan Maret 2021 telah diselenggarakan DIVSTI sosialisasi terbaru fitur E-Procurement. Proc terkait DLI ini kepada pejabat pengadaan di UIW. Modul E-procurement terintegrasi dan antarmuka SAP optimis selesai pada Q4 tahun 2021. Target DLI8 pada tahun 2021 adalah 50% dari kontrak dalam nilai keuangan yang dieksekusi oleh UIW dan terdaftar di E-Proc. dan SAP. Progress hingga Q IV 2021 DIV MRP dan IVA telah

menyepakati mekanisme penghitungan pencapaian DLI 8, sedangkan perhitungan DIV MRP adalah 55,79% berdasarkan perbandingan data Eproc Procurement dan SAP PO. sedangkan perhitungan untuk DIV MRP adalah 55,79% berdasarkan perbandingan data Eproc Procurement dan SAP PO. Dari data semua materi nomor+teks+pencocokan vendor, tercatat ada 4.068 item senilai Rp. 1,8 triliun (sumber SAP), ini disebut penyebut. Berdasarkan proses pencocokan data E-proc dan SAP, ditemukan kecocokan vendor+dokumen sebanyak 70 item dan kecocokan nomor material+vendor 965 dengan nilai total Rp. 1 triliun, keduanya disebut sebagai pembilang. Rekapitulasi perhitungan DLI 8 adalah sebagai berikut::

**Table 14: DLI 8 Calculation Recapitulation**

SAP Source Table	Sum of Net Order	No of Records	% of Net Order
<b>IVA: LINKED</b>	<b>1,005,332,148,279</b>	<b>1,035</b>	<b>55.79%</b>
<b>PLN: LINKED</b>	<b>1,005,332,148,279</b>	<b>1,035</b>	<b>55.79%</b>
Vendor+Document Match	40,369,978,167	70	2.24%
* No Material Num+Vendor Match	40,369,978,167	70	2.24%
* No Material Num+Text+Vendor Match	40,369,978,167	70	2.24%
UIW Kalimantan Barat	1,290,334,020	1	0.07%
UIW Kalselteng	31,495,887,389	64	1.75%
UIW Maluku&Malut	27,961,406	1	0.00%
UIW Papua&Papua Barat	7,555,795,352	4	0.42%
* No Vendor+Document Match	964,962,170,112	965	53.55%
<b>Material Num+Vendor Match</b>	<b>964,962,170,112</b>	<b>965</b>	<b>53.55%</b>
Material Num+Text+Vendor Match	964,962,170,112	965	53.55%
UIW Kalimantan Barat	257,573,755,273	226	14.30%
UIW Kalselteng	225,747,650,364	217	12.53%
UIW Kaltim & Utara	148,061,892,097	159	8.22%
UIW Maluku&Malut	154,097,433,549	198	8.55%
UIW Papua&Papua Barat	179,481,438,829	165	9.96%
<b>IVA: * NOT LINKED</b>	<b>796,507,895,658</b>	<b>3,033</b>	<b>44.21%</b>
<b>PLN: * NOT LINKED</b>	<b>796,507,895,658</b>	<b>3,033</b>	<b>44.21%</b>
* No Vendor+Document Match	796,507,895,658	3,033	44.21%
* No Material Num+Vendor Match	796,507,895,658	3,033	44.21%
* No Material Num+Text+Vendor Match	796,507,895,658	3,033	44.21%
UIW Kalimantan Barat	297,740,356,602	958	16.52%
UIW Kalselteng	184,006,688,997	952	10.21%
UIW Kaltim & Utara	213,349,360,475	738	11.84%
UIW Maluku&Malut	59,159,158,912	252	3.28%
UIW Papua&Papua Barat	42,252,330,672	133	2.34%
<b>Grand Total</b>	<b>1,801,840,043,937</b>	<b>4,068</b>	<b>100.00%</b>

1. Pencocokan Nomor Material + Nama Vendor
  - a. Terdapat 965 record berupa 53,55% dari total PO SAP
  - b. Semua catatan juga dengan status Material Num+Text+Vendor Match
2. Pencocokan Vendor+Dokumen
  - a. terdapat 70 record berupa 2,24% dari total PO SAP
3. Hasil link PLN dan IVA sama dengan 1.035 record yaitu 55,79% dari total PO SAP
  - a. Tautan PLN dilakukan melalui Nomor Materi+Teks+Pencocokan Vendor dan Pencocokan Dokumen
  - b. Tautan IVA dilakukan melalui Nomor Materi+Pencocokan Vendor dan Pencocokan Vendor+Dokumen
4. Hasil metode tautan PLN dan IVA yang sama menunjukkan bahwa situasi data sedemikian rupa sehingga:
  - a. sebuah. Nomor Material+Vendor (Tautan IVA) dan Nomor Material+Teks+Vendor (Link PLN) adalah sama
  - b. Baik Dokumen (Tautan PLN) dan Vendor+Dokumen (Tautan IVA) adalah sama

### 3.4 Non-Indikator Terkait Pencairan (Non-DLI)

#### 3.4.1 RBL Non-DLI 1: Peningkatan Penggunaan Waktu

Target non-DLI adalah optimalisasi penggunaan waktu dalam kegiatan setelah mendapatkan akses listrik untuk pelanggan laki-laki dan perempuan. Ruang lingkup evaluasi dan penilaian adalah Maluku dan Papua. DIV MRE telah menyiapkan Syarat dan Rencana Kerja (RKS) terkait kajian tersebut. Pada tanggal 26 Maret DIVMRE menyampaikan kepada DIVRMP bahwa hasil pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dinyatakan gagal karena hanya ada 1 (satu) calon penyedia jasa. Pada bulan April 2021 DIVRMP diserahkan kepada DIVMRE untuk pengadaan kembali. Hasil pengadaan kembali masih mendapatkan 1 (satu) calon penyedia jasa. Namun, pada tahap negosiasi pada 24 Juni 2021, belum ada kesepakatan harga penawaran dari PLN. Sehingga pengadaan ini berpotensi gagal. Pada 14 Januari 2022, PLN mengundang ADB untuk membahas tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021, di mana salah satu aturan mengatur persyaratan minimum biaya investasi yang diusulkan untuk keikutsertaan konsultan asing dalam lelang terbuka internasional. . Pertemuan tersebut menghasilkan hal-hal berikut yang perlu dilakukan::

- a. ADB akan mempekerjakan tim konsultan individu internasional di luar hibah.
- b. PLN akan menyewa perusahaan survei nasional.

Untuk penyusunan focal person working group, DIV RMP akan menyiapkan surat penugasan untuk membantu pelaksanaan Social Impact Assessment. Hasil pembahasan yaitu rekomendasi tim pendamping adalah sebagai berikut:

**Table 15: Proposal Draft of the Socio-economic Assesment Assistance Team**

No	Jabatan	Divisi	Tugas	
1	EVP Perencanaan dan Pengendalian Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMP	Ketua Tim	Bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan Penilaian Dampak Sosial
2	VP Manajemen Keuangan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMP	Wakil Ketua Tim 1	Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Social Impact Assessment
3	VP Pengelolaan Aset Distribusi Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMD	Wakil Ketua Tim 2	Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Social Impact Assessment
4	VP Pengembangan dan Standarisasi Proses Administrasi Perencanaan dan Enjiniring	MRE	Anggota	Melakukan pengadaan konsultan
5	VP CSR & PKBL	KOM	Anggota	Memberikan data/informasi kepada SET PER untuk membuat laporan tahunan/laporan keberlanjutan PLN dan memastikan bahwa Social Impact Assessment disertakan dalam laporan tersebut
6	VP Hubungan Investor, Institusional dan GCG	SET PER	Anggota	Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk membuat laporan tahunan/laporan keberlanjutan untuk PLN dan memastikan bahwa Social Impact Assessment dimasukkan dalam laporan tersebut
7	VP Manajemen Keuangan Regional Sumatera Kalimantan	RSP	Anggota	Memantau pelaksanaan Social Impact Assessment
8	VP Pengamanan Pendapatan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMR	Anggota	Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Social Impact Assessment

No	Jabatan	Divisi	Tugas	
9	VP Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	RKO	Anggota	Memantau pelaksanaan Social Impact Assessment sesuai dengan Perjanjian Hibah dan Pinjaman
10	Senior Manager Perencanaan	UIW MMU	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dan Gender Hibah, termasuk rencana elektrifikasi dan lain-lain.
11	Senior Manager Perencanaan	UIW P2B	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dan Gender Hibah, termasuk rencana elektrifikasi dan lain-lain.
12	Senior Manager Niaga & Pelayanan Pelanggan	UIW MMU	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Hibah Sosial Ekonomi dan Gender Impact Evaluation, termasuk hasil pemantauan kinerja (data calon pelanggan, pertumbuhan pelanggan, peningkatan penjualan, dll) di wilayah Maluku dan Papua
13	Senior Manager Niaga & Pelayanan Pelanggan	UIW P2B	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Hibah Sosial Ekonomi dan Gender Impact Evaluation, termasuk hasil pemantauan kinerja (data calon pelanggan, pertumbuhan pelanggan, peningkatan penjualan, dll) di wilayah Maluku dan Papua

Pembentukan pokja lintas divisi saat ini sedang dalam proses meminta peninjauan kembali SK Tim ke DIV KPJ.

### 3.4.2 RBL Non-DLI 2: Dilaksanakan Pelatihan dasar PLTS Komunitas Percontohan

Target dalam Non DLI ini adalah pelatihan komunitas percontohan yang dilakukan tentang perawatan dasar PLTS dimana PLTS tersebut memiliki teknologi pemantauan jarak jauh dengan partisipasi perempuan minimal 30% pada tahun 2021-2024. Progres TW IV tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan kondisi pada triwulan sebelumnya yaitu pengembangan materi pembelajaran Result Indicator 7/ Non-DLI 2 telah selesai dan telah divalidasi dengan Tim ADB pada tanggal 22 September 2021 Training on Trainer (ToT) dengan peserta Unit Utama akan dilaksanakan setelah pemantauan jarak jauh dan hibridisasi PLTS dengan sistem manajemen energi tersedia diharapkan pada tahun 2025 berdasarkan skenario terburuk bahwa anggaran untuk pengadaan konsultan Pendukung PLTS komunal adalah diterbitkan untuk tahun 2023. Rencana pelaksanaan Pelatihan Komunitas Percontohan tentang Pemeliharaan Dasar PLTS komunal akan dilaksanakan pada Q2 2025 sesuai dengan TOR yang diusulkan untuk pengadaan konsultan teknologi PLTS komunal baru di KMP. Jadwal pelatihan komunitas percontohan tentang pemeliharaan dasar PLTS komunal adalah sebagai berikut:



### 3.5 Implementasi Hibah

#### 3.5.1 Hibah JFPR (Japan Fund for Poverty Reduction)

- a. **Target 1.** Tambahan 16.000 rumah tangga miskin yang mendapatkan listrik PLN pada tahun 2024, dengan hasil yang dipilah berdasarkan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki/perempuan. Saat ini, mekanisme penganggaran dan pencatatan aset sedang diupayakan di PLN. PLN tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan hibah menggunakan anggaran operasional Regional. PLN telah mengadakan pertemuan dengan divisi terkait (DIVANG, DIV PBH, DIV AKT, dan DIV Regional) untuk mencari jalan agar pelaksanaan hibah dapat berjalan tanpa mengganggu regulasi di PLN. Selain itu, Divisi Regional akan mempersiapkan kembali target calon penerima hibah pada tahun 2022.
- b. **Target 2:**
  - (i) Sebuah e-modul dikembangkan dan dua sesi pelatihan-pelatih tentang pelaksanaan lokakarya komunitas untuk penggunaan energi yang aman dan produktif yang dilakukan dengan partisipasi. ADB memberikan masukan terkait materi dari Pusdiklat PLN pada 27 September 2021. Pusdiklat PLN menyelenggarakan Training on Trainer bagi pegawai PLN yang telah diusulkan oleh UIW menjadi 3 gelombang. Dari Batch 1 dan Batch 2 (Agustus 2021), dan Batch 3 (Oktober 2021), ada total 68 peserta dengan total 28 peserta perempuan.
  - (ii) Materi yang peka terhadap budaya (misalnya bahasa dan literasi, antara lain) untuk penggunaan energi yang aman dan produktif. Materi peka budaya (misalnya bahasa dan literasi, antara lain) untuk penggunaan energi yang aman dan produktif dapat dikembangkan oleh masing-masing dari 29 kantor UP3 untuk lokakarya pendidikan masyarakat.
- c. **Target 3.** Penilaian sosial-ekonomi dan gender dasar yang dilakukan pada tahun 2021 dan evaluasi dampak sosial-ekonomi dan gender tindak lanjut dengan masukan dari kelompok kerja ahli. PLN dan ADB telah sepakat bahwa ADB akan mempekerjakan tim konsultan individu internasional di luar hibah dan PLN akan mempekerjakan perusahaan survei nasional. Untuk penyusunan focal person working group, dibentuk working group dari divisi terkait di PLN Pusat dan UIW di Maluku – Papua. DIV RMP akan menyiapkan surat penugasan untuk membantu pelaksanaan Socio-Economic and Gender Impact Assessment. Saat ini dalam proses persetujuan dan penandatanganan draft Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Tim Asistensi Pelaksanaan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dan Gender di Maluku Papua.

#### 3.5.2 Hibah ACEF (Asian Clean Energy Fund)

- a. **Target 1:**
  - (i) Tambahan produksi listrik dari PV surya (<10 MW) meningkat dengan tambahan 4.020 MWh setiap tahun pada tahun 2024. (2019 baseline 0 MWh).
  - (ii) 17.500 KK memiliki akses listrik PLN dari PLTS yang ditingkatkan pada tahun 2024. (2019 baseline 0 KK).
- b. **Target 2:**
  - (i) 10 PLTS PLN ditingkatkan dan dioperasikan dengan pemantauan jarak jauh pada tahun 2024. (2019 baseline 0 PLTS ditingkatkan).



### 3.6 Rencana Aksi Program (PAP) Implementasi Program RBL ADB

Item PAP	Indikator	Tim Penanggung Jawab	Jangka Waktu	Klaim PLN kepada ADB
1	<p>Merencanakan dan menyelesaikan pemilihan lokasi dan komponen untuk penguatan dan perluasan sistem distribusi, dan kriteria untuk mengurutkan intervensi terkait di bawah program. Untuk Maluku-Papua, pertimbangkan hasil studi elektrifikasi dengan biaya terendah yang dilakukan pada 2017-2018, analisis geospasial lebih lanjut, dan upaya berkelanjutan pada pengembangan rantai penyimpanan dingin</p> <p>(i) Rencana tahunan yang ditetapkan untuk perluasan sistem distribusi dan pengembangan energi terbarukan, dengan mempertimbangkan analisis opsi berbiaya paling rendah dan upaya berkelanjutan pada pengembangan rantai penyimpanan dingin</p> <p>(ii) Desain teknis yang disiapkan untuk perluasan jalur distribusi dan instalasi energi terbarukan termasuk estimasi biaya dan bill of quantity</p> <p>(iii) Pelatihan keselamatan yang dilakukan untuk staf PLN dan kontraktor sebelum/selama konstruksi.</p> <p>(iv) Laporan/catatan penyelesaian disiapkan</p>	UIW; DIV RSP and DIV RMP	Dari 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk sampel KKP tersedia untuk pekerjaan Distribusi, baik pemasaran, perluasan jaringan, dan tambahan kapasitas ET tersedia <ul style="list-style-type: none"> <li>• UIW Kalbar: 3 program Distribusi dan 1 program EBT</li> <li>• UIW Kalselteng: 3 Program Distribusi dan tidak ada Program EBT pada tahun 2021/2022</li> <li>• UIW Kaltimra: 3 Program Distribusi dan 2 Program EBT</li> <li>• UIW MMU: 3 program Distribusi dan 1 program EBT</li> <li>• P2B UIW: 4 Program Distribusi</li> </ul> </li> <li>2. PLN UIW di KMP memiliki bukti SKAI dan SKKI TW IV 2021 dan SKKI 2021 tersedia</li> <li>3. PLN memiliki contoh dokumentasi pelaksanaan safety briefing PLN dan mitranya di TW IV <ul style="list-style-type: none"> <li>• UIW Kalbar: 6 set dokumen</li> <li>• UIW Kalselteng: 4 dokumen JSA</li> <li>• UIW Kaltimra: 3 dokumen JSA</li> <li>• UIW MMU: 1 dokumen</li> <li>• UIW P2B: 1 set JSA Semester II</li> </ul> </li> <li>4. PLN memiliki BAST untuk pekerjaan 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>• UIW Kalbar: 2 dokumen</li> <li>• UIW Kalselteng: 2 dokumen</li> <li>• UIW Kaltimra: 7 dokumen</li> <li>• UIW MMU: 4 dokumen</li> <li>• UIW P2B: 3 dokumen</li> </ul> </li> <li>5. PLN memiliki bukti komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait kebutuhan listrik, ALMA, dan cold storage <ul style="list-style-type: none"> <li>• UIW Kalbar: tidak ada dokumen di semester II 2021</li> <li>• UIW Kalselteng: 4 set dokumen</li> <li>• UIW Kaltimra: 4 set dokumen</li> <li>• UIW MMU: 7 dokumen</li> <li>• P2B UIW: tidak ada dokumen di semester II 2021</li> </ul> </li> <li>6. PLN memiliki realisasi investasi TW IV 2021</li> </ol>
<b>Technical Design</b>				

2	(i) Tinjau laporan langkah-langkah pengaturan tegangan saat ini untuk jalur distribusi termasuk aplikasi untuk regulator tegangan otomatis/langkah untuk jalur MV (ii) Panduan teknis yang dikembangkan untuk regulator tegangan otomatis/langkah .	DIV RKO PUSLITBAN DIV RSP DV RMP	Dari 2022 dan 2023	Puslitbang PLN dalam proses review data teknis dari UIW di KMP Rencana penyelesaian berdasarkan timeline yang diajukan adalah akhir 2022/2023
3	(i) Studi dilakukan untuk meninjau sistem distribusi tiga fase saat ini dan sistem distribusi satu fase . (ii) Jika memungkinkan, rekomendasi teknis disampaikan kepada Direksi untuk SPL dan/atau SWER.	DIV RKO PUSLITBANG DIV RSP DV RMP	Dari 2022 dan 2023	Puslitbang PLN dalam proses review data teknis dari UIW di KMP Rencana penyelesaian berdasarkan timeline yang diajukan adalah akhir 2022/2023
<b>Program Result</b>				
4	(i) Laporan pencapaian hibah terhadap target indikatif: (a) tambahan 16.000 KK miskin yang dialiri listrik PLN, dengan hasil yang dipilah berdasarkan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan/laki-laki, (b) pengembangan e-modul dan dua sesi pelatihan untuk pelatih lokakarya masyarakat untuk penggunaan energi yang aman dan produktif yang dilakukan dengan partisipasi setidaknya 58 staf PLN, termasuk staf perempuan, terdiri dari dua staf yang bertanggung jawab atas lokakarya sosialisasi dari masing-masing 29 kantor UP3 dan staf PLN terkait lainnya; (c) materi peka budaya (misalnya bahasa dan literasi, antara lain) untuk penggunaan energi yang aman dan produktif yang disediakan untuk masing-masing dari 29 kantor UP3 untuk lokakarya pendidikan masyarakat; (ii) Melakukan perekrutan dengan menggunakan penawaran kompetitif internasional bagi sebuah perusahaan untuk melakukan studi dasar sosio-ekonomi dan gender dan mengadakan kelompok kerja ahli, termasuk para ahli ADB, mengenai penilaian dampak, untuk meninjau dan menyetujui keluaran perusahaan; (iii) Melakukan penilaian dampak sosial-ekonomi dan gender dengan database program yang dapat ditanyakan di Maluku dan Papua, dengan masukan dari kelompok kerja ahli untuk didukung oleh manajemen PLN.	DIV RKO, PUSDIKLAT, DIV MRE, DIV RSP and DV RMP	Dari 2021	(i) a. Pada status pencapaian sambungan rumah tangga miskin masih dalam permohonan anggaran kas operasional ke DIVANG b. TOT telah dilaksanakan dalam 3 gelombang, dan masing-masing telah mengajukan perwakilannya dengan total 60 karyawan dengan melibatkan karyawan wanita; c. Materi peka budaya (misalnya bahasa dan literasi, antara lain) untuk penggunaan energi yang aman dan produktif dapat dikembangkan oleh masing-masing dari 29 kantor UP3 untuk lokakarya pendidikan masyarakat. Materi peka budaya ini ditambahkan melalui UP3 masing-masing sesuai dengan budaya setempat (bahasa/kebiasaan sehari-hari/adat/dll). penambahan elemen material yang peka budaya terjadi selama lokakarya (ii) DIV RMP akan menyiapkan surat tugas untuk membantu pelaksanaan Kajian Dampak Sosial Ekonomi dan Gender. Hasil pembahasan yaitu rekomendasi tim pendamping adalah sebagai berikut:

				<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Divisi</th> <th></th> <th>Tugas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EVP Perencanaan dan Pengendalian Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara</td> <td>RMP</td> <td>Ketua Tim</td> <td>Bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan Penilaian Dampak Sosial</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VP Manajemen Keuangan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara</td> <td>RMP</td> <td>Wakil Ketua Tim 1</td> <td>Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Social Impact Assessment</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VP Pengelolaan Aset Distribusi Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara</td> <td>RMD</td> <td>Wakil Ketua Tim 2</td> <td>Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Social Impact Assessment</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VP Pengembangan dan Standarisasi Proses Administrasi Perencanaan dan Engineering</td> <td>MRE</td> <td>Anggota</td> <td>Melakukan pengaduan konsultasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VP CSR &amp; PRDL</td> <td>KOM</td> <td>Anggota</td> <td>Membenakan data/informasi kepada SET PER untuk membuat laporan tahunan/laporan keberlanjutan PLN dan memastikan bahwa Social Impact Assessment disertakan dalam laporan tersebut</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>VP Hubungan Investor, Institutional dan GSG</td> <td>SET PER</td> <td>Anggota</td> <td>Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk membuat laporan tahunan/laporan keberlanjutan untuk PLN dan memastikan bahwa Social Impact Assessment dimasukkan dalam laporan tersebut</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VP Manajemen Keuangan Regional Sumatera Kalimantan</td> <td>RSP</td> <td>Anggota</td> <td>Memantau pelaksanaan Social Impact Assessment</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>VP Pengamanan Pendapatan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara</td> <td>RMR</td> <td>Anggota</td> <td>Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Social Impact Assessment</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>VP Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri</td> <td>RKO</td> <td>Anggota</td> <td>Memantau pelaksanaan Social Impact Assessment sesuai dengan Perjanjian Hibah dan Pinjaman</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Senior Manager Perencanaan</td> <td>UIW MMU</td> <td>Anggota</td> <td>Membantu menyediakan data/informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dan Gender Hibah, termasuk rencana elektrifikasi dan lain-lain.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Senior Manager Perencanaan</td> <td>UIW P2B</td> <td>Anggota</td> <td>Membantu menyediakan data/informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dan Gender Hibah, termasuk rencana elektrifikasi dan lain-lain.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Senior Manager Niaga &amp; Pelayanan Pelanggan</td> <td>UIW MMU</td> <td>Anggota</td> <td>Membantu menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Hibah Sosial Ekonomi dan Gender Impact Evaluation, termasuk hasil pemantauan kinerja (data calon pelanggan, pertumbuhan pelanggan, peningkatan penjualan, dll) di wilayah Maluku dan Papua</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Senior Manager Niaga &amp; Pelayanan Pelanggan</td> <td>UIW P2B</td> <td>Anggota</td> <td>Membantu menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Hibah Sosial Ekonomi dan Gender Impact Evaluation, termasuk hasil pemantauan kinerja (data calon pelanggan, pertumbuhan pelanggan, peningkatan penjualan, dll) di wilayah Maluku dan Papua</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iii) Pembentukan pokja lintas divisi saat ini sedang dalam proses meminta peninjauan kembali SK Tim ke DIV KPJ</p> <p>(iv) DIV RMP akan menyiapkan surat penugasan untuk membantu pelaksanaan Social Impact Assessment.</p>	No	Jabatan	Divisi		Tugas	1	EVP Perencanaan dan Pengendalian Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMP	Ketua Tim	Bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan Penilaian Dampak Sosial	2	VP Manajemen Keuangan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMP	Wakil Ketua Tim 1	Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Social Impact Assessment	3	VP Pengelolaan Aset Distribusi Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMD	Wakil Ketua Tim 2	Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Social Impact Assessment	4	VP Pengembangan dan Standarisasi Proses Administrasi Perencanaan dan Engineering	MRE	Anggota	Melakukan pengaduan konsultasi	5	VP CSR & PRDL	KOM	Anggota	Membenakan data/informasi kepada SET PER untuk membuat laporan tahunan/laporan keberlanjutan PLN dan memastikan bahwa Social Impact Assessment disertakan dalam laporan tersebut	6	VP Hubungan Investor, Institutional dan GSG	SET PER	Anggota	Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk membuat laporan tahunan/laporan keberlanjutan untuk PLN dan memastikan bahwa Social Impact Assessment dimasukkan dalam laporan tersebut	7	VP Manajemen Keuangan Regional Sumatera Kalimantan	RSP	Anggota	Memantau pelaksanaan Social Impact Assessment	8	VP Pengamanan Pendapatan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMR	Anggota	Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Social Impact Assessment	9	VP Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	RKO	Anggota	Memantau pelaksanaan Social Impact Assessment sesuai dengan Perjanjian Hibah dan Pinjaman	10	Senior Manager Perencanaan	UIW MMU	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dan Gender Hibah, termasuk rencana elektrifikasi dan lain-lain.	11	Senior Manager Perencanaan	UIW P2B	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dan Gender Hibah, termasuk rencana elektrifikasi dan lain-lain.	12	Senior Manager Niaga & Pelayanan Pelanggan	UIW MMU	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Hibah Sosial Ekonomi dan Gender Impact Evaluation, termasuk hasil pemantauan kinerja (data calon pelanggan, pertumbuhan pelanggan, peningkatan penjualan, dll) di wilayah Maluku dan Papua	13	Senior Manager Niaga & Pelayanan Pelanggan	UIW P2B	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Hibah Sosial Ekonomi dan Gender Impact Evaluation, termasuk hasil pemantauan kinerja (data calon pelanggan, pertumbuhan pelanggan, peningkatan penjualan, dll) di wilayah Maluku dan Papua
No	Jabatan	Divisi		Tugas																																																																						
1	EVP Perencanaan dan Pengendalian Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMP	Ketua Tim	Bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan Penilaian Dampak Sosial																																																																						
2	VP Manajemen Keuangan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMP	Wakil Ketua Tim 1	Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Social Impact Assessment																																																																						
3	VP Pengelolaan Aset Distribusi Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMD	Wakil Ketua Tim 2	Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Social Impact Assessment																																																																						
4	VP Pengembangan dan Standarisasi Proses Administrasi Perencanaan dan Engineering	MRE	Anggota	Melakukan pengaduan konsultasi																																																																						
5	VP CSR & PRDL	KOM	Anggota	Membenakan data/informasi kepada SET PER untuk membuat laporan tahunan/laporan keberlanjutan PLN dan memastikan bahwa Social Impact Assessment disertakan dalam laporan tersebut																																																																						
6	VP Hubungan Investor, Institutional dan GSG	SET PER	Anggota	Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk membuat laporan tahunan/laporan keberlanjutan untuk PLN dan memastikan bahwa Social Impact Assessment dimasukkan dalam laporan tersebut																																																																						
7	VP Manajemen Keuangan Regional Sumatera Kalimantan	RSP	Anggota	Memantau pelaksanaan Social Impact Assessment																																																																						
8	VP Pengamanan Pendapatan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	RMR	Anggota	Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Social Impact Assessment																																																																						
9	VP Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	RKO	Anggota	Memantau pelaksanaan Social Impact Assessment sesuai dengan Perjanjian Hibah dan Pinjaman																																																																						
10	Senior Manager Perencanaan	UIW MMU	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dan Gender Hibah, termasuk rencana elektrifikasi dan lain-lain.																																																																						
11	Senior Manager Perencanaan	UIW P2B	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi dan Gender Hibah, termasuk rencana elektrifikasi dan lain-lain.																																																																						
12	Senior Manager Niaga & Pelayanan Pelanggan	UIW MMU	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Hibah Sosial Ekonomi dan Gender Impact Evaluation, termasuk hasil pemantauan kinerja (data calon pelanggan, pertumbuhan pelanggan, peningkatan penjualan, dll) di wilayah Maluku dan Papua																																																																						
13	Senior Manager Niaga & Pelayanan Pelanggan	UIW P2B	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Hibah Sosial Ekonomi dan Gender Impact Evaluation, termasuk hasil pemantauan kinerja (data calon pelanggan, pertumbuhan pelanggan, peningkatan penjualan, dll) di wilayah Maluku dan Papua																																																																						
5	<p>(i) Laporan pencapaian hibah terhadap target indikatif: (a) pembangkit listrik dari PV surya (&lt;10 MW) meningkat sebesar 4.020 MWh per tahun; (b) 17.500 KK memiliki akses listrik PLN dari PLTS yang ditingkatkan;</p> <p>(ii) 10 PLTS PLN ditingkatkan dan beroperasi dengan pemantauan jarak jauh;</p> <p>(iii) 10 PLTS PLN yang diupgrade dan dioperasikan dengan hibridisasi menggunakan sistem manajemen energi; dan</p> <p>(iv) Setidaknya satu pelatihan komunitas percontohan disampaikan tentang pemeliharaan PLTS dasar di mana pemantauan jarak jauh digunakan dengan setidaknya 30% partisipasi perempuan.</p>	DIV EBT, DIV RMP, DIV RSP, DIV RKO	Dari 2021	<p>(i) Ada 14 lokasi di KMP yang diusulkan ke TOR, yang akan dinilai oleh konsultan sebagai Non DLI 2. 2 dari 14 lokasi PLTS, Derawan atau Sebatik yang akan ditingkatkan menjadi pemantauan pilot jarak jauh dan pelatihan lokal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi</th> <th>Kondisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kalimantan Barat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. PLTS Pulau Limbung (60 kWp), Ds Pulau Limbung, Kec Sungai Raya, Kab Kubu Raya</td> <td>Damaged</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. PLTS Temajok (80 kWp), Ds Temajok, Kec Paloh, Kab Sambas</td> <td>Damaged</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. PLTS Siding (40 kWp), Ds Temong, Kec Siding, Kab Bengkayang</td> <td>Damaged</td> </tr> </tbody> </table>	No	Lokasi	Kondisi	1	Kalimantan Barat			a. PLTS Pulau Limbung (60 kWp), Ds Pulau Limbung, Kec Sungai Raya, Kab Kubu Raya	Damaged		b. PLTS Temajok (80 kWp), Ds Temajok, Kec Paloh, Kab Sambas	Damaged		c. PLTS Siding (40 kWp), Ds Temong, Kec Siding, Kab Bengkayang	Damaged																																																							
No	Lokasi	Kondisi																																																																								
1	Kalimantan Barat																																																																									
	a. PLTS Pulau Limbung (60 kWp), Ds Pulau Limbung, Kec Sungai Raya, Kab Kubu Raya	Damaged																																																																								
	b. PLTS Temajok (80 kWp), Ds Temajok, Kec Paloh, Kab Sambas	Damaged																																																																								
	c. PLTS Siding (40 kWp), Ds Temong, Kec Siding, Kab Bengkayang	Damaged																																																																								

					2	Kalimantan Timur & Utara <b>(Pilot Project)</b>	
						a. PLTS Sebatik (340 kWp), Ds Padaidi, Kec Sebatik, Kab Nunukan	Operation
						b. PLTS Derawan (90 kWp), Ds Derawan, Kec Pulau Derawan, Kab Berau	Operation
					3	Maluku & Maluku Utara	
						a. PLTS Pulau Tior (100 kWp), Ds Tioor, Kec Tioor, Kab Seram Bagian Timur	Operation
						b. PLTS Daruba, (950 kWp) Ds Wamama, Kec Morotai Selatan, Kab Pulau Morotai	Operation
					4	Papua & Papua Barat	
						a. PLTS Off Grid Beo (30 kWp), Ds Beo, Kec Waisai, Kab Raja Ampat	Operation
						b. PLTS Off Grid Bianci (30 kWp), Ds Bianci, Kec Waigeo Barat, Kab Raja Ampat	Operation
						c. PLTS Arborek (25 kWp), Ds Arborek, Kec Meos Mansar, Kab Raja Ampat	Damaged
						d. PLTS Saonek (42 kWp), Ds Saonek, Kec Waigeo Selatan, Kab Raja Ampat	Damaged
						e. PLTS Oksibil (300 kWp), Ds Kabiding, Kec Oksibil, Kab Pegunungan Bintang	Operation
						f. PLTS Mansinam (50 kWp), Ds Mansinam, Kec Manokwari Timor, Kab Manokwari	Operation
						g. PLTS Dogiyai (300 kWp) , Ikebo, Kec Kamu, Kab Dogiyai	Damaged
						(i) Belum ada kemajuan. pengadaan dan pembangunan peningkatan sistem untuk PLTS lainnya akan dilakukan dalam kontrak terpisah dengan konsultan pendukung PLTS	
						(ii) Belum ada kemajuan. pengadaan dan pembangunan peningkatan sistem untuk PLTS lainnya akan dilakukan dalam kontrak terpisah dengan konsultan pendukung PLTS	

				(iii) Pusdiklat PLN telah menyelesaikan dan menyerahkan pengembangan materi pelatihan sesuai masukan dari ADB pada 22 September 2021. Ini akan dimutakhirkan untuk menggabungkan hasil dari peningkatan PLTS pada pemantauan jarak jauh dan hibridisasi menggunakan EMS.
<b>Monitoring and Evaluation</b>				
6	(i) Kajian rutin triwulanan atas pelaksanaan program RBL yang ditetapkan pada rapat koordinasi antara kantor pusat PLN dan UIW. (ii) Lihat 7(i) di bawah Gender.		Dari 2020	(i) a. DIVRSP sebagai koordinator telah menyiapkan alur kerja untuk komunikasi, pemantauan, dan evaluasi pencapaian DLI dan PAP. (ii) b. WAG tersedia untuk komunikasi, koordinasi dan berbagi informasi terkait dengan Program. (iii) c. PLN telah melakukan evaluasi dan monitoring bersama seluruh PIC untuk pelaksanaan DLI dan PAP setiap semester pada tahun 2021. Pada tahun 2022, untuk melengkapi kebutuhan PAP ini, PLN akan melakukan evaluasi setiap triwulan. (iv) Tersedia modul antarmuka antara database PLN AP2T dan TNP2K Nasional yang memungkinkan identifikasi dan pelacakan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan/laki-laki dan dapat dipantau pada periode waktu tertentu dan per UP3 di UIW.
<b>Gender</b>				
7	(i) Modul antarmuka antara AP2T PLN dan database TNP2K Nasional dikembangkan dan diterapkan untuk memungkinkan identifikasi dan pelacakan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan/laki-laki. (ii) Modul pelatihan tentang peluang mata pencaharian bagi perempuan termasuk dalam pelatihan pendidikan konsumen tentang penggunaan energi yang aman dan produktif. (iii) Lihat 4 (iii) tentang penilaian dampak, termasuk dampak terhadap gender. (iv) Lihat 5 (iv) tentang pelatihan komunitas percontohan tentang pemeliharaan dasar PLTS.	DIV ATS, DIV STI, PUSDIKLAT	(i) Dari 2020 (ii) Dari 2020 (iii) 2025 (iv) 2025	(i) Modul antarmuka antara AP2T PLN dan database TNP2K Nasional dapat digunakan tetapi memerlukan menu opsi gender tambahan. PLN melalui DIV ATS telah mengajukan permohonan UAT kepada DIV APN dan DIV STI, Diharapkan selesai akhir Februari 2022. (ii) PLN Pusdiklat telah menyelesaikan pengembangan modul pelatihan tentang peluang mata pencaharian bagi perempuan yang termasuk dalam pendidikan konsumen (DLI 7). Pelatihan tentang penggunaan energi yang aman dan produktif sedang berlangsung. (iii) Dalam TOR dijelaskan bahwa dalam survey masyarakat dilakukan wawancara dengan 5 nara sumber, 1 - 2 diantaranya adalah perempuan. (iv) Berdasarkan timeline pelaksanaan, pelatihan akan dilaksanakan pada tahun 2025

Manajemen Keuangan				
8	(i) Laporan keuangan triwulanan terkonsolidasi yang diproduksi secara otomatis oleh MAXICO. (ii) E-Budget dilaksanakan di daerah sasaran program. (iii) Staf di semua divisi yang relevan dilatih dalam penggunaan sistem MAXICO dan E-Budget	DIV ANG  DIV AKT  DIV STI	Dari 2020	(i) Bukti laporan keuangan konsolidasi MAXICO telah disampaikan, pada triwulan IV pelaporan keuangan tidak melalui aplikasi (manual) karena proses revamping akun oleh DIV STI.   <p>Diharapkan mulai Januari 2022 sudah bisa digunakan dan untuk penyesuaian akun hal itu akan terus terjadi .</p> (ii) E-Budget diimplementasikan pada target program Daerah. Bukti penggunaan dokumentasi E-Budget di UIW telah disampaikan. (prestasi sekali dalam program)           (iii) Telah hadir update program Single Source of Truth (SSoT) dari pihak pengembang IT dan saat ini memasuki tahap pertama yaitu perbaikan jangka pendek, 1 dari 6 tahap sedang dilakukan.
9	Ringkasan tingkat tinggi dari inisiatif internal utama dan dampaknya termasuk dalam laporan kemajuan RBL kuartal ke-2 dan tahunan .	DIV MPU	Dari 2020	PLN (DIV MPU) telah memperbarui daftar pemantauan kemajuan 19 inisiatif utama untuk mengurangi biaya dan memperkuat keberlanjutan keuangan hingga Desember 2021
<b>Pengadaan</b>				

10	Laporan diserahkan mengikuti Kerangka Pemantauan pengadaan.	DIV MRP, DIV RSP, DIV RMP, and UIW	Dari 2020	Data rekapitulasi pengadaan TW IV 2021 telah disampaikan oleh DIV MRP pada 24 Februari 2022.																																										
11	Merekrut konsultan melalui penawaran kompetitif internasional untuk mendukung PLN dalam PLTS (a) analisis kegagalan, (b) desain, pengadaan, dan commissioning peningkatan PLTS dengan pemantauan jarak jauh dan hibridisasi menggunakan EMS, dan (c) penerapan prosedur operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk jarak jauh pemantauan dan operasi EMS.	DIV RSP, DIV RMP, DIV EBT and DIV MRE	Dari 2021	On Progress. 1. Dokumen TOR dan RAB telah diserahkan kepada pelaksana pengadaan. Proses periklanan internasional telah dilakukan. 2. Pengadaan terkendala terkait penyesuaian PP No 25 Tahun 2021 tentang persyaratan minimal usulan biaya investasi penyertaan asing (international bidding)																																										
12	Procurement audits each year of 10% of all contracts at Wilayah/Area offices. Procurement audits conducted and information sheet shared with ADB	DIV MRP, DIV RSP, DIV RMP, UIW, and SPI	From 2021	SPI telah menyampaikan laporan audit distribusi semester II tahun 2021 di UIW Kalimantan dan Maluku-Papua dengan data sebagai berikut:  <i>Table 2. Population and Sample Distribution Procurement Agreement / Contract</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun Audit Year</th> <th>Unit</th> <th>Jumlah Populasi Total Population</th> <th>Jumlah Sampling Total Sampling</th> <th>Persentase Sampling Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2021</td> <td>UP3 SINGKAWANG</td> <td>66</td> <td>31</td> <td>46.97%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2021</td> <td>UIW KALBAR</td> <td>45</td> <td>21</td> <td>46.67%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2021</td> <td>UP3 PALANGKARAYA</td> <td>19</td> <td>4</td> <td>21.05%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2021</td> <td>UIW KALSELTENG</td> <td>48</td> <td>6</td> <td>12.50%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2021</td> <td>UIW KALTIMRA</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL</b></td> <td><b>189</b></td> <td><b>62</b></td> <td><b>32.80%</b></td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahun Audit Year	Unit	Jumlah Populasi Total Population	Jumlah Sampling Total Sampling	Persentase Sampling Percentage	1	2021	UP3 SINGKAWANG	66	31	46.97%	2	2021	UIW KALBAR	45	21	46.67%	3	2021	UP3 PALANGKARAYA	19	4	21.05%	4	2021	UIW KALSELTENG	48	6	12.50%	5	2021	UIW KALTIMRA	11	0	0%	<b>TOTAL</b>			<b>189</b>	<b>62</b>	<b>32.80%</b>
No	Tahun Audit Year	Unit	Jumlah Populasi Total Population	Jumlah Sampling Total Sampling	Persentase Sampling Percentage																																									
1	2021	UP3 SINGKAWANG	66	31	46.97%																																									
2	2021	UIW KALBAR	45	21	46.67%																																									
3	2021	UP3 PALANGKARAYA	19	4	21.05%																																									
4	2021	UIW KALSELTENG	48	6	12.50%																																									
5	2021	UIW KALTIMRA	11	0	0%																																									
<b>TOTAL</b>			<b>189</b>	<b>62</b>	<b>32.80%</b>																																									

Table 2. Population and Sample Distribution Procurement Agreement / Contract					
No	Audit Year	Unit	Total Population	Total Sampling	Percentage Sampling
1	2021	UP3 Sofifi	42	1	2,38%
2	2021	UP2K Provinsi Maluku	99	47	47,47%
3	2021	UIW MMU	1	1	100%
<b>Total</b>			142	49	34,51%

Table 2. Population and Sample Contracts Procurement Distribution and Procurement Micro Scale Solar Power Plant					
No	Audit Period	Units	Population	Number of Sample	Sampling Percentage
1	2021	UP3 Sorong	0	0	0%
2	2021	UP2K Papua	99	63	64%
3	2021	UIW Papua dan Papua Barat	12	7	58%
4	2021	UPK Papua dan Papua Barat	0	0	0%
<b>Total</b>			111	70	63%

Safeguard

13	<p>Memperkuat kapasitas kelembagaan pada upaya perlindungan lingkungan dan sosial, masing-masing, dengan: (i) menunjuk focal person upaya <i>safeguards</i> di setiap kantor UIW, UP3 dan UP2K; (ii) pemberian bimbingan teknis dan pelatihan personil PLN tentang penerapan PSSA dan PAP; (iii) mengembangkan kode praktik perlindungan lingkungan dan sosial untuk pembangkit listrik tenaga surya PV, mini/mikro hidro, dan biogas kecil yang akan mencakup kriteria untuk memilih lokasi, pengendalian polusi, pemantauan lingkungan, sumber berkelanjutan dan pengelolaan bahan bakar biomassa, dan komunitas konsultasi serta template untuk UKL/UPL.</p> <p>(i) Focal Persons Safeguards yang ditunjuk di HSSE, PPT, masing-masing kantor UIW, UP3 dan UP2K. (ii) Bimbingan Teknis termasuk materi pelatihan tentang pengamanan untuk EGDP I (SNT) diperbarui untuk memasukkan tindakan program untuk EGDP II</p>	DIV K3L, DIV RSP, DIV RMP, DIV RSD, DIV RMD, and UIW	Dari 2020	<p>(i) DIV RSP akan mengajukan surat resmi penugasan untuk Focal person sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh UIW, UP3, dan UP2K, target akhir Juli dan revisi pertama Desember 2021. Untuk DIV RMD akan ada update Focal Persons Social Safeguards Unit pada akhir November 2021. Karena banyaknya perubahan yang disampaikan oleh Unit terkait Focal Persons, maka Surat Tugas Focal Person akan direvisi secara Regional pada bulan Juni dan Desember setiap tahun. Implementasi di Unit akan mengikuti fokal terbaru yang telah ditunjuk oleh GM melalui surat pengajuan ke Regional. Surat Tugas Revisi 1 Bidang Sosial dan Lingkungan di Kalimantan dengan No. 0488.Stg/SDM.02.07/001090100/2021. Sedangkan untuk MP, surat tugas untuk penanggung jawab sosial dan lingkungan menggunakan nomor pertama No. 0358.STg/SDM.02.07/C01100100/2021 tetapi untuk penanggung jawab sosial berubah dengan No. 0472.STg/SDM.02.07/ C01100400/2021. Seluruh UIW bersama UP3 dan UP2K sudah memiliki focal person sosial dan lingkungan.</p> <p>(ii) Pedoman teknis telah diserahkan (oleh Hatfield) kepada ADB dan PLN untuk ditinjau. Pada Januari 2022, PLN dan Hatfield telah melakukan diskusi untuk</p>
----	--	--	-----------	--

	<p>(iii) Pelatihan tahunan dilakukan untuk Focal Person Lingkungan dan Sosial, perwakilan dari masing-masing kantor UIW, UP3 dan UP2K, dan perwakilan dari kantor ULP sesuai kebutuhan, melalui Corporate University PLN.</p> <p>(iv) Brosur pengarahan tentang persyaratan upaya perlindungan yang disiapkan dan disebarluaskan (melalui sesi pengarahan) kepada vendor/kontraktor yang dikontrak tentang upaya perlindungan lingkungan dan sosial.</p> <p>(v) Kode praktik perlindungan yang dikembangkan untuk pembangkit listrik tenaga surya, mini/mikro-hidro, dan fasilitas biogas kecil</p>			<p>review TG. Setelah mendapatkan masukan dari ADB dan melakukan pembahasan review, TG akan diserahkan kembali ke ADB pada akhir Maret 2022.</p> <p>(iii) DIV K3L telah menyelenggarakan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial tahunan berdasarkan isu dan permasalahan yang sedang dihadapi . Pelatihan telah dilaksanakan pada tanggal 29-30 November 2021 . Total peserta yang hadir sebanyak 195 orang (termasuk Headoffice). Hampir semua focal person menghadiri pelatihan tersebut, seperti yang dijelaskan di bawah ini:</p> <table border="1" data-bbox="1332 462 2139 1313"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Environment focal person</th> <th>Social focal person</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">UIW Kalbar</td> <td>Kantor Induk</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>UP3 Ketapang</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>UP3 Singkawang</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP3 Sanggau</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>UP3 Pontianak</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP2K Kalbar</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">UIW Kalselteng</td> <td>Kantor Induk</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>UP3 Banjarmasin</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP3 Barabai</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP3 Kotabaru</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP3 Kuala Kapuas</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP3 Palangkaraya</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP2D Kalselteng</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>UP2K Kalsel</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP2K Kalteng</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">UP3 Kaltimra</td> <td>Kantor Induk</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>UP3 Berau</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP3 Samarinda</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP3 Balikpapan</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP3 Bontang</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UP3 Kaltara</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>UP2K Kaltim</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>UP2K Kaltara</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Environment focal person	Social focal person	UIW Kalbar	Kantor Induk	3	3	UP3 Ketapang	2	2	UP3 Singkawang	3	1	UP3 Sanggau	1	0	UP3 Pontianak	2	1	UP2K Kalbar	1	0	UIW Kalselteng	Kantor Induk	1	4	UP3 Banjarmasin	1	1	UP3 Barabai	1	1	UP3 Kotabaru	1	1	UP3 Kuala Kapuas	1	1	UP3 Palangkaraya	1	1	UP2D Kalselteng	1	2	UP2K Kalsel	1	1	UP2K Kalteng	1	1	UP3 Kaltimra	Kantor Induk	4	2	UP3 Berau	2	1	UP3 Samarinda	2	1	UP3 Balikpapan	0	1	UP3 Bontang	0	1	UP3 Kaltara	1	2	UP2K Kaltim	1	2	UP2K Kaltara	2	1
		Environment focal person	Social focal person																																																																													
UIW Kalbar	Kantor Induk	3	3																																																																													
	UP3 Ketapang	2	2																																																																													
	UP3 Singkawang	3	1																																																																													
	UP3 Sanggau	1	0																																																																													
	UP3 Pontianak	2	1																																																																													
	UP2K Kalbar	1	0																																																																													
UIW Kalselteng	Kantor Induk	1	4																																																																													
	UP3 Banjarmasin	1	1																																																																													
	UP3 Barabai	1	1																																																																													
	UP3 Kotabaru	1	1																																																																													
	UP3 Kuala Kapuas	1	1																																																																													
	UP3 Palangkaraya	1	1																																																																													
	UP2D Kalselteng	1	2																																																																													
	UP2K Kalsel	1	1																																																																													
	UP2K Kalteng	1	1																																																																													
	UP3 Kaltimra	Kantor Induk	4	2																																																																												
UP3 Berau		2	1																																																																													
UP3 Samarinda		2	1																																																																													
UP3 Balikpapan		0	1																																																																													
UP3 Bontang		0	1																																																																													
UP3 Kaltara		1	2																																																																													
UP2K Kaltim		1	2																																																																													
UP2K Kaltara	2	1																																																																														

				<table border="1"> <tr><td>UIW MMU</td><td>Kantor Induk</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Ambon</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Ternate</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Tual</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Sofifi</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Masohi</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>UP2K Maluku</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>UP2K Maluku Utara</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>UIW PPB</td><td>Kantor Induk</td><td>2</td><td>4</td></tr> <tr><td></td><td>UPK P2B</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Jayapura</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Sorong</td><td>6</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Manokwari</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Biak</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Merauke</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Timika</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Nabire</td><td>2</td><td>9</td></tr> <tr><td></td><td>UP3 Wamena</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td>UPPK Papua</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>UPPK Papua Barat</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table> <p>(iv) Brosur (untuk aspek sosial) akan menjadi bagian dari TG. Hatfield (safeguard firm) ditunjuk untuk mempersiapkannya dan akan membicarakannya nanti dengan ADB untuk work order. Brosur juga akan ibe dimasukkan dalam TG.</p> <p>(v) (Draf CoP (disiapkan oleh Hatfield) telah didiskusikan dengan DIV K3L untuk ditinjau. CoP terdiri dari CoP untuk Solar PV, CoP untuk Mini/mikro hidro, dan CoP untuk biogas kecil. draft final CoP akhir Maret 2022</p>	UIW MMU	Kantor Induk	1	1		UP3 Ambon	1	3		UP3 Ternate	1	2		UP3 Tual	1	2		UP3 Sofifi	1	4		UP3 Masohi	2	1		UP2K Maluku	1	1		UP2K Maluku Utara	0	1	UIW PPB	Kantor Induk	2	4		UPK P2B	1	0		UP3 Jayapura	1	2		UP3 Sorong	6	3		UP3 Manokwari	2	2		UP3 Biak	1	5		UP3 Merauke	3	3		UP3 Timika	2	1		UP3 Nabire	2	9		UP3 Wamena	0	3		UPPK Papua	1	0		UPPK Papua Barat	0	1
UIW MMU	Kantor Induk	1	1																																																																																	
	UP3 Ambon	1	3																																																																																	
	UP3 Ternate	1	2																																																																																	
	UP3 Tual	1	2																																																																																	
	UP3 Sofifi	1	4																																																																																	
	UP3 Masohi	2	1																																																																																	
	UP2K Maluku	1	1																																																																																	
	UP2K Maluku Utara	0	1																																																																																	
UIW PPB	Kantor Induk	2	4																																																																																	
	UPK P2B	1	0																																																																																	
	UP3 Jayapura	1	2																																																																																	
	UP3 Sorong	6	3																																																																																	
	UP3 Manokwari	2	2																																																																																	
	UP3 Biak	1	5																																																																																	
	UP3 Merauke	3	3																																																																																	
	UP3 Timika	2	1																																																																																	
	UP3 Nabire	2	9																																																																																	
	UP3 Wamena	0	3																																																																																	
	UPPK Papua	1	0																																																																																	
	UPPK Papua Barat	0	1																																																																																	
14	Memperkuat penyaringan dan penilaian kerangka pengaman: (i) menyaring rencana kerja tahunan untuk memastikan kegiatan kategori A untuk lingkungan, pemukiman kembali tidak secara sukarela dan Masyarakat Adat (Masyarakat Adat) tidak termasuk dalam program; (ii) menyiapkan UKL/UPL kegiatan tahunan UIW dan menyerahkan ke DLH untuk mendapat persetujuan	(i) UIW and DIV K3L (ii) UIW and DIV K3L (iii) UIW, DIV	Dari 2020	<p>Untuk mencapai PAP upaya perlindungan lingkungan, DIV K3L telah menerbitkan surat No. 8314/KLH.00.01/C01060500/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal informasi target DLI dan PAP serta pedoman pengisian formulir penapisan.</p> <p>(i) Formulir penyaringan RBL KMP direvisi untuk menyederhanakan format. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan ADB dan PLN, dokumen</p>																																																																																

	<p>(i) Jalur distribusi, solar PV, mini/mikro-hidro, dan rencana pengembangan pembangkit biogas disaring secara internal untuk perlindungan lingkungan oleh UIW berdasarkan daftar desa di kawasan keanekaragaman hayati utama, dan dipantau oleh DIV K3L.</p> <p>(ii) Rencana kerja tahunan UIW disaring dan dikategorikan oleh DLH dan Departemen Kehutanan</p> <p>(iii) laporan penyaringan dan kategorisasi Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela dan Masyarakat Adat (Masyarakat Adat) yang disiapkan oleh UIW dan ditinjau oleh DIV RSD dan DIV RMD</p> <p>(iv) UKL/UPL kegiatan tahunan disiapkan sesuai dengan hasil penyaringan dan diserahkan ke DLH terkait. Ringkasan eksekutif UKL/UPL diungkapkan di situs web PLN. Laporan lengkap tersedia berdasarkan permintaan.</p>	<p>RSD and DIV RMD</p> <p>(iv) UIW and DIV K3L</p>		<p>yang digunakan untuk formulir penyaringan tahun 2021 adalah kegiatan tahunan (rencana kerja) yang mengacu pada SKAI (anggaran disetujui), sedangkan formulir penyaringan tahun 2022, rencana kerja tahunan akan mengacu pada usulan anggaran (berdasarkan dokumen KKP). Seluruh UIW telah berpartisipasi mengisi formulir penyaringan tahun 2021. Tidak ada penambahan EBT pada tahun 2021, kecuali di PPB UIW. Berdasarkan formulir penyaringan, ada beberapa rencana kerja yang masuk ke dalam wilayah KBA dan/atau IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. UIW Kalselteng: 6 rencana kerja (81,5 km) disaring sebagai KBA, 2 rencana kerja (9,9 km) sebagai IP.</li> <li>b. UIW Kaltimra: 4 workpan (1,5 km) disaring sebagai KBA, 2 workplan (21 km) sebagai IP.</li> <li>c. UIW Kalbar: tidak ada</li> <li>d. UIW MMU: 9 workplan (63,4 km) disaring sebagai KBA, 2 workplan (2 km) sebagai IP</li> <li>e. UIW PPB: 17 rencana kerja termasuk Solar PV (35 km) disaring sebagai KBA, 6 rencana kerja (5 km) sebagai IP.</li> </ul> <p>(ii) Sampai dengan Q4 2021, ada 3 Unit yang telah mengajukan surat permintaan arahan Dokumen Lingkungan ke KLHK, yaitu UIW Kalbar, UIW Kaltimra, dan UIW Kalselteng. UIW Kalbar sudah mendapatkan arahan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pada 5 Oktober 2021, UIW Kaltimra pada 21 Desember 2021, dan UIW Kalselteng masih menunggu arahan. UIW MMU dan UIW P2B sedang mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan surat resmi permohonan.</p> <p>(iii) sebagian selesai. Dari 38 unit UP3/UP2K, skrining IR dilaporkan sebanyak 26 unit.</p> <p>(iv) Menunggu selesainya proses poin (ii)</p>
15	<p>Memperkuat konsultasi yang bermakna dengan orang-orang yang terkena dampak termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan. Meningkatkan mekanisme penanganan keluhan</p>	<p>UIW, UP3, UP2K, DIV RMD and DIV</p>	<p>2020 dan seterusnya</p>	<p>Pengajuan formulir 6 pengamanan sosial masih belum lengkap, Untuk Kalimantan, seluruh UIW telah menyerahkan form 6 Monitoring Implementasi Safeguard)</p>

	<p>(i) Kelompok rentan (rumah tangga miskin, masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak/pemuda) diundang untuk berkonsultasi.</p> <p>(ii) Topik konsultasi meliputi pemilihan lokasi dan implikasi jalur distribusi, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro, dan biogas, perkiraan biaya untuk sambungan dan instalasi listrik, prosedur mengakses program listrik gratis bagi masyarakat miskin, dan kesadaran akan penggunaan yang aman. dan manfaat ekonomi dari listrik.</p> <p>(iii) Catatan konsultasi tentang isu-isu yang dibahas dan kesepakatan yang dicapai dengan peserta dilengkapi dengan daftar hadir yang dipisahkan berdasarkan gender dan status adat (adat).</p> <p>(iv) Semua keluhan/keluhan dan tindakan perbaikan dicatat dan disusun.</p>	RSD	<p>Untuk Unit UIW Kalbar yang telah mengirimkan form 6 adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UP2K Kalbar</li> <li>- UP3 Sanggau</li> </ul> <p>Aksi yang telah dilakukan oleh DIVRSD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Surat kepada UIW di Kalimantan 7 Juli 2021 tentang Informasi Formulir safeguard Sosial</li> <li>(2) Sosialisasi tentang safeguard sosial ke UIW di Kalimantan sebanyak 3 kali: 22 Juli 2021, 25 Nov 2021, dan 22 Februari 2022</li> <li>(3) Undangan kepada UIW di Kalimantan untuk mempresentasikan kegiatan pengamanan sosialnya pada tahun 2021; dilakukan pada 11 Januari 2022</li> </ol> <p>Alasan yang menyebabkan keterlambatan laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Safeguard sosial merupakan hal baru yang ditangani oleh DIVRSD. Transfer pengetahuan dari DIVPPT ke DIVRSD dan DIVRMD dilakukan pada Juni/Juli 2021, sehingga UIW memulai kegiatan tersebut pada Semester 2 2021</li> <li>- Karena merupakan hal baru bagi DIVRSD dan DIVRMD untuk membimbing UIWs, implementasi dari social safeguard ini masih merupakan proses pembelajaran.</li> <li>- Tidak ada Divisi khusus yang menangani pengamanan sosial ini seperti DIVK3L yang menangani pengamanan lingkungan. DIVRSD dan DIVRMD fokus pada operasi dan pengelolaan aset distribusi, sehingga pengamanan sosial hanya sebagian dari beberapa kegiatan yang ditangani oleh RSD dan RMD</li> </ul> <p>UIW Kalbar 57 konsultasi telah dilakukan seperti yang dilaporkan dalam formulir 6  UIW Kalselteng, 25 konsultasi telah dilakukan seperti yang dilaporkan dalam formulir 6  UIW Kaltimra, 45 konsultasi telah dilakukan seperti yang dilaporkan dalam formulir 6</p> <p>Screening IR dan IP telah dilakukan sebagai form screening di PAP 14</p> <p>Pencapaian PAP 15 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seperti disebutkan di atas, setiap UIW di Kalimantan telah melakukan konsultasi kepada kelompok rentan (bukti: dalam formulir 6)</li> <li>2) Topik konsultasi : informasi tentang proyek dan dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat, kesadaran penggunaan yang aman dan manfaat ekonomi dari listrik, prosedur untuk mengakses listrik, informasi tentang PLN Mobile</li> <li>3) Seperti yang dilaporkan dalam formulir 6. Bukti MoM tersedia di google</li> </ol>
--	--	-----	---

				drive. Daftar kehadiran dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, tersedia di google drive 4) Pengaduan dilaporkan dalam form 7 yang tersedia di google drive PAP 17. Tidak ada pengaduan yang diterima oleh seluruh UIW di Kalimantan
16	<p>Meningkatkan transparansi dan kompensasi yang adil untuk pengadaan tanah yang dinegosiasikan dan sumbangan tanah sukarela untuk memastikan bahwa orang akan mempertahankan tingkat pendapatan atau mata pencaharian yang sama atau lebih baik</p> <p>(i) Perjanjian tertulis (tanah pribadi) untuk trafo distribusi (ii) Perjanjian tertulis mengenai sumbangan tanah sukarela untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan biogas dan PLTS tingkat desa dari pemilik tanah atau anggota marga masyarakat adat dengan hak akses komunal sebelum konstruksi dimulai. (iii) Verifikasi setengah tahunan (sampel) oleh pihak independen untuk memastikan bahwa pembebasan tanah yang dinegosiasikan dan sumbangan tanah sukarela dilakukan melalui konsultasi yang tepat. Sumbangan sukarela tidak terlalu mempengaruhi standar hidup orang-orang yang terkena dampak (donor tidak miskin dan tidak kehilangan lebih dari 5% dari total tanah yang dimiliki; tanah sumbangan bukan tanah leluhur dan di daerah keramat). (iv) Mitigasi yang tepat (kompensasi untuk aset non-tanah yang hilang atau program pemulihan pendapatan dan pendapatan) untuk pengguna lahan yang terkena dampak program.</p>	(i), (ii): UIW, UP3, UP2K, DIV RMD and DIV RSD (iii): IVA (iv) UIW, UP3, and UP2K	Dari 2021	<p>Penyerahan BA perjanjian tata guna lahan telah disampaikan beberapa UIW (UIW Kalselteng dan UIW Kaltimra namun belum dipisahkan/dihitung untuk pencapaian tahun 2021 saja. UIW Kalselteng dan Kaltimra mengurus perjanjian perijinan tata guna lahan untuk seluruh trafo yang ada, tidak hanya pada tahun 2021 saja. Hal ini karena Dirregsumkal pernah menginstruksikan kepada UIW untuk mengurus perijinan perjanjian penggunaan lahan sesuai Buku 4).</p> <p><b>(i) Perjanjian tertulis untuk trafo distribusi</b> <b>-Status per UIW</b></p> <p>a. UIW Kalbar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah trafo distribusi yang terpasang : 37 (Pemilik tanah : 13).</li> <li>- Jumlah perjanjian tertulis dari pemilik tanah : 13</li> </ul> <p>b. UIW Kaltimra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah trafo distribusi yang terpasang : 253 (pemilik tanah : 98, komunal 8)</li> <li>- Jumlah perjanjian tertulis : 68</li> </ul> <p>c. UIW Maluku &amp; Maluku Utara telah mengajukan kesepakatan tertulis yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Selama semester 1 2021 terdapat 1 kesepakatan tertulis masing-masing di UP3 Tual, UP3 Ambon, UP2K Maluku dan UP3 Saumlaki. Sedangkan selama semester 2 2021 terdapat 1 perjanjian tertulis di UP2K Maluku dan 2 perjanjian tertulis di UP3 Saumlaki</p> <p><b>(ii) Perjanjian tertulis mengenai sumbangan tanah sukarela untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan biogas dan PLTS tingkat desa dari pemilik tanah</b> <b>-Status per UIW</b></p> <p>a. Untuk Kalimantan tidak ada pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas dan PLTS tingkat desa</p> <p>b. Untuk Kalimantan tidak ada pembebasan lahan dan donasi</p>

				c. Untuk Kalimantan Tidak ada pembebasan/pembelian tanah
17	<p>Memantau dan melaporkan kepatuhan terhadap tindakan program upaya perlindungan dan dampak program terhadap pendapatan/mata pencaharian rumah tangga yang terkena dampak. Mempersiapkan dan menerapkan tindakan korektif jika dampak buruk pada pendapatan/mata pencaharian teridentifikasi</p> <p>(i) Laporan pelaksanaan RBL Q2 dan Q4 yang diserahkan ke ADB mencakup hasil konsolidasi dari penyaringan upaya perlindungan dan tindakan program upaya perlindungan.</p> <p>(ii) Dampak kegiatan program terhadap pendapatan / penghidupan orang-orang yang terkena dampak dipantau oleh DIV PPT melalui tinjauan penanganan pengaduan dan catatan kompensasi. Tindakan korektif diterapkan dan didokumentasikan jika dampak buruk pada pendapatan/mata pencaharian diidentifikasi.</p> <p>(iii) Penilaian apakah akses masyarakat adat terhadap listrik telah meningkat pada Tinjauan Tengah Waktu dan akhir Program.</p>	DIV K3L, DIV RSD, and DIV RMD	Dari 2021	<p>Untuk form pengaduan (form 7) konsultasi kepada perorangan/kelompok/publik semester 2 tahun 2021 telah direkap oleh UIW Kalbar, untuk UIW lainnya masih dalam rekapitulasi</p> <p>(i) Hasil penapisan safeguard dan tindakan program safeguard telah dicantumkan dalam laporan PLN yang dituangkan dalam achievement per indicator (PAP)</p> <p>(ii) Untuk Kalimantan, seluruh UIW telah menyerahkan formulir 7 Monitor Dampak Sosial Ekonomi dan belum ditemukan/terjadi efek sehingga tidak ada tindakan korektif yang perlu dikaji ulang oleh DIVRSD</p> <p>Tidak ada kompensasi yang diberikan oleh UIW Kalimantan untuk jalur distribusi dan tidak ada proyek EBT di Kalimantan</p> <p>(iii) PLN UIW di KMP telah melakukan konfirmasi data jumlah pelanggan listrik PLN di desa adat melalui data referensi "Daftar IP 2021".</p>

PAP 9. Ringkasan Tingkat Tinggi Inisiatif Internal Utama dan Dampaknya Termasuk Dalam Laporan Kemajuan RBL Kuartal ke-2 dan Tahunan

<b>Date of Report</b>	14 January 2022	<b>For Period Ended</b>	6 months to 31 <sup>st</sup> December 2021
<b>Version</b>	1.0	<b>Update</b>	1 <sup>st</sup> Update

No	Sub Initiative Number	Sub Initiative	Deskripsi	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Status (berdasarkan Wave)	Biaya / Manfaat yang Diharapkan	Biaya/Manfaat Sebenarnya
1	5744	PIPA GAS REDUKSI DAN OPTIMALKAN KONSUMSI LNG TANGGUH	Mengoptimasikan gas pipa yang ada dengan menggantikan dengan suplai LNG dari Tangguh	01/08/2020	15/12/2021	Cancelled	Ket: Arahan IO bahwa SI tsb sudah tidak relevan dikarenakan kondisi energi primer khususnya BB, sehingga gas pipa tidak dapat dioptimasi dan justru digunakan secara maksimal. BL menyetujui bahwa SI tsb dapat dicancel di wave	-
2	1108	Peluncuran Fiber Optik: Buat dan Jalankan Program Pemasaran dan Penjualan - 2024	Menyusun dan menjalankan Pemasaran dan Penjualan Program Fiber Optic secara bertahap sampai tahun 2024	20/08/2020	31/12/2024	On track	Pendapatan yang diharapkan Rp12.6T (2024)	Saving start in 2024
3	504	Penyelesaian Proyek Transmisi dan GI di UIP JBT - Jalur Utara Jawa	Menyelesaikan proyek transmisi dan Gardu Induk (GI) pada Jawa bagian tengah sehingga dapat menyalurkan	01/01/2020	30/09/2021	Executed	Penghematan yang diharapkan Rp 280 M (2022), Rp 1.68T (2023), Rp 2.42T (2024)	Saving start in 2022

No	Sub Initiative Number	Sub Initiative	Deskripsi	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Status (berdasarkan Wave)	Biaya / Manfaat yang Diharapkan	Biaya/Manfaat Sebenarnya
			energi dari pembangkit yang lebih murah				L4 Executed 10 Sept 2021	
4	500	Penyelesaian Proyek Transmisi dan GI di UIP JBB	Menyelesaikan proyek transmisi dan Gardu Induk (GI) pada Jawa bagian barat sehingga dapat menyalurkan energi dari pembangkit yang lebih murah	01/01/2020	01/12/2022	On track	Penghematan yang diharapkan Rp 280 M (2022), Rp 1,68M (2023), Rp 2,42 T (2024)	- Progress of land acquisition and engineering for SUTET Priok-Muara Tawar - Foundation progress in 4 foundation towers for SUTET Muarakarang-Duri Kosambi
5	496	Optimasi daya reaktif melalui pemasangan kapasitor di wilayah JBT	Upaya untuk menjaga tegangan pada kondisi normal agar dapat menyalurkan energi dari pembangkit yang lebih murah melalui pemasangan kapasitor pada GI	01/01/2020	01/12/2021	Executed	Dari tahun 2021 diharapkan penghematan sebesar Rp 856 miliar per tahun	Saving in 2021 Rp16B
6	505	Penyelesaian Proyek Transmisi dan GI di UIP JBTB	Menyelesaikan proyek transmisi dan Gardu Induk (GI) pada Jawa bagian timur dan Bali sehingga dapat menyalurkan energi	01/12/2021	01/12/2024	On track	Penghematan yang diharapkan Rp900 miliar (2023), Rp 2,3 triliun (2024)	Saving start in 2023

No	Sub Initiative Number	Sub Initiative	Deskripsi	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Status (berdasarkan Wave)	Biaya / Manfaat yang Diharapkan	Biaya/Manfaat Sebenarnya
			dari pembangkit yang lebih murah.					
7	898	Optimasi biaya regasifikasi pada kontrak baru FSRU Jawa Barat	Melakukan optimasi pada kontrak baru FSRU Jawa Barat mengganti kontrak eksisting yang akan habis pada tahun 2022	01/10/2019	31/12/2022	On track	Penghematan sebesar Rp 1,24T di tahun 2023 dan 2024 diharapkan	- Progress awaits BOD decision - Saving start in 2023
8	4	[QW2021] Meningkatkan O&M dalam pemeliharaan jaringan	Melakukan perbaikan Manajemen Operasi dan Pemeliharaan pada pemeliharaan jaringan untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan.	01/06/2020	31/12/2022	Executed	-	-
9	468	Scale Up EAM Distribusi di Jawa-Bali	Mengimplementasikan Program Enterprise Asset Management (EAM) pada bidang distribusi di Jawa Bali untuk mengurangi gangguan	01/05/2019	15/12/2021	Executed	Penghematan yang diharapkan sebesar Rp 8,16 miliar (2021) L4 Dieksekusi 9 Sept 2021	Get saving of Rp72,5 M
10	2459	[QW 20] Penurunan Biaya Transportasi Batubara PJBB melalui Negosiasi	Melakukan Negosiasi Kontrak batubara Eksisting untuk memperoleh biaya transportasi yang lebih efisien	01/01/2020	15/10/2020	Executed	Penghematan yang diharapkan sebesar Rp 56 Miliar (2021)	Get saving of Rp45,7 M

No	Sub Initiative Number	Sub Initiative	Deskripsi	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Status (berdasarkan Wave)	Biaya / Manfaat yang Diharapkan	Biaya/Manfaat Sebenarnya
11	4864	Pengembangan Icon Cash e-money	Pengembangan platform dompet elektronik (e-wallet) untuk menghasilkan revenue tambahan bagi PLN.	21/09/2020	30/06/2022	On track	Pendapatan yang diharapkan sebesar Rp7,1 miliar (2021), Rp9,6 miliar (2022), Rp12.9 miliar (2023), Rp 17.1 miliar (2024)	-
12	1141	[QW 20] Coal Switching – PJB	Program penurunan nilai kalori batubara dari Medium Rank Coal (MRC) menjadi Low Rank Coal (LRC) untuk menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) batubara pada PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar Awar	11/05/2020	30/11/2020	Executed	Mulai tahun 2021 diharapkan penghematan masing-masing sebesar Rp 155 miliar, Rp 145 miliar, Rp138 miliar, Rp136 miliar	Saving in 2021 Rp19B
13	5213	Roll out AA for EE 2021 - Java (Brantas, Pacitan, Rembang)	Menerapkan advanced analytics untuk meningkatkan efisiensi energi pada PLTU Brantas, Pacitan, dan Rembang.	01/01/2021	31/12/2021	Executed	Penghematan Rp 105,3 miliar per tahun dari 2022 diharapkan	Saving start in 2022
14	487	Captive Power: Prospek panas - terlibat dan menangkan pasokan listrik dengan PT ITP (50 MW)	Upaya meningkatkan penjualan pada pemilik captive power PT ITP	20/05/2018	31/12/2020	Executed	Pendapatan yang diharapkan sebesar Rp148 miliar (2022),	Saving start in 2022

No	Sub Initiative Number	Sub Initiative	Deskripsi	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Status (berdasarkan Wave)	Biaya / Manfaat yang Diharapkan	Biaya/Manfaat Sebenarnya
			agar menggunakan listrik dari PLN				Rp197,3 miliar (2023-2024)	
15	1106	[KPI] Membuat dan Menjalankan Marketing and Sales Program - 2022	Melakukan end-to-end customer acquisition activities	20/08/2020	30/11/2022	On Track	Pendapatan yang diharapkan sebesar Rp1,32T (2022)	Saving start in 2022
16	7931	Possible prospects - oil and gas Pertamina MoU RU VI Balongan	Upaya negosiasi dan melakukan kontrak dengan pelanggan Captive Pertamina RU VI Balongan	11/01/2021	30/06/2022	On Track	Pendapatan yang diharapkan sebesar Rp59,2M (2022), Rp236.8M (2023), Rp236.8M (2024)	Proses SPJBTL Saving start in 2022
17	12866	Captive prospect - Mining/Smelter: PT Stargate Mineral Asia (200 MVA)	Upaya negosiasi dan melakukan kontrak dengan pelanggan Captive PT Stargate Mineral Asia	12/11/2021	17/06/2022	On Track	Pendapatan yang diharapkan sebesar Rp29,9 miliar (2023) dan Rp358,8 miliar (2024)	Saving start in 2023
18	497	Optimasi daya reaktif melalui pemasangan kapasitor di wilayah JB TMB	Melakukan Optimasi Dispatch di wilayah JB TMB	8/08/2020	1/12/2024	On Track	Pendapatan yang diharapkan sebesar Rp161,1 miliar (2023) dan Rp161,1 miliar (2024)	Saving start in 2023
19	509	Penyelesaian Proyek Transmisi dan GI di SBS - Perkuatan Sumsel- Lampung dan Evakuasi PLTP Rantau Dadap	Menyelesaikan proyek transmisi dan Gardu Induk (GI) pada Sumatera Bagian Selatan sehingga dapat menyalurkan energi dari pembangkit yang lebih murah	8/08/2020	1/12/2024	On Track	Penghematan yang diharapkan Rp40 miliar (2023), Rp 261 miliar (2024)	Saving start in 2023

